

**STRATEGI OPTIMALISASI  
PENGLOLAAN SUMBER DAYA  
PERIKANAN DAN KELAUTAN DAERAH**  
(Studi Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUHIMMATUS SA'ADAH**

**NIM. 0910313116**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

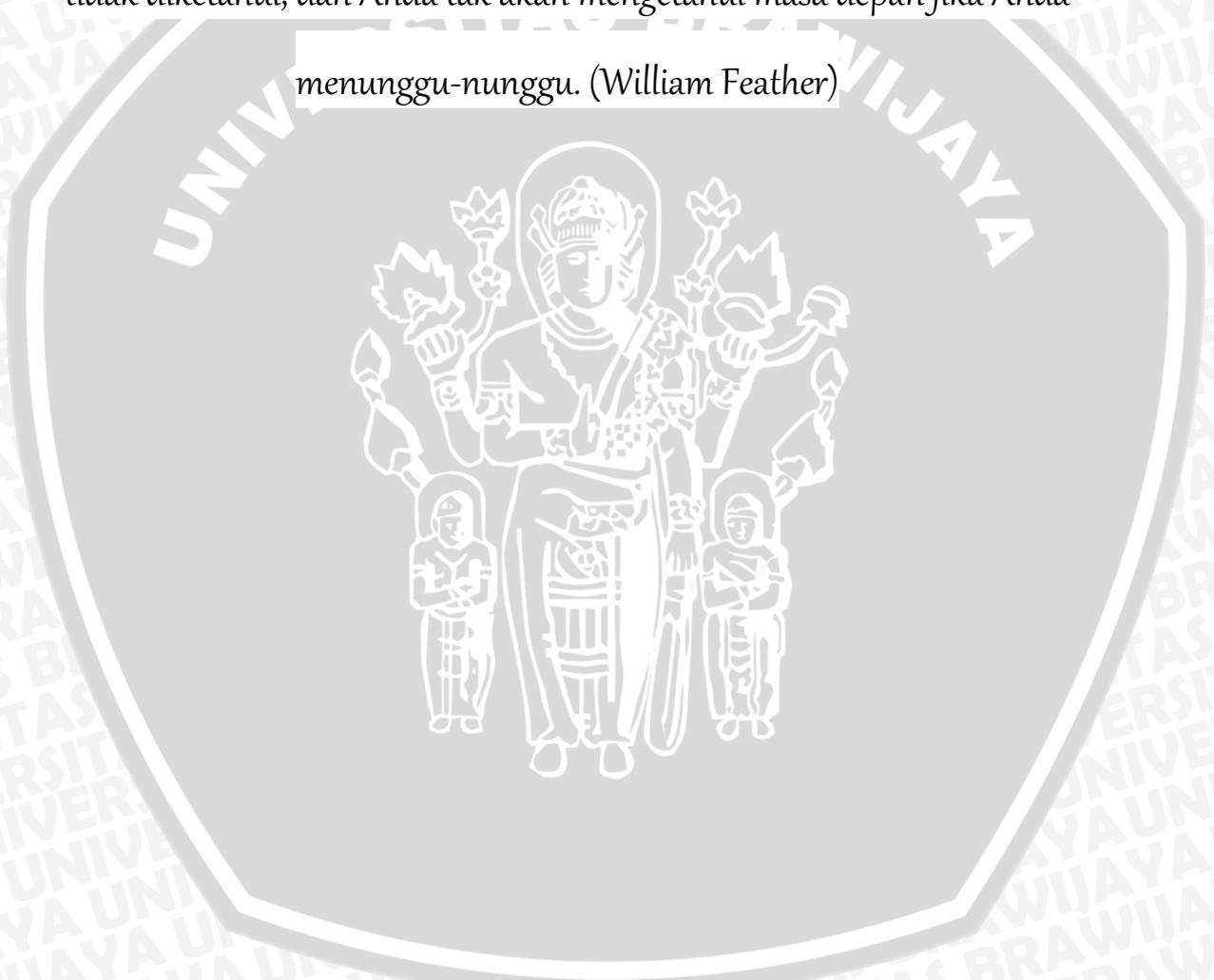
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2013**

## MOTTO

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. (William Feather)



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Daerah (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan)".

Disusun Oleh : Muhimmatus Sa'adah

NIM : 0910313116

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 09 Juli 2013

**Komisi Pembimbing**

Ketua



**Dr. Imam Hardjanto, MBA., MAP**  
NIP. 19460619 197412 1 001

Anggota



**Drs. Romula Adiono, MAP**  
NIP. 19620401 198703 1 003

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Juli 2013  
Pukul : 11.00 WIB  
Skripsi atas nama : Muhimmatus Sa'adah  
Judul : "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Daerah (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan)"

dan dinyatakan LULUS

## MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Imam Hardjanto, MBA., MAP  
NIP. 19460619 197412 1 001

Anggota



Drs. Romula Adiono, MAP  
NIP. 19620401 198703 1 003

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si  
NIP. 19530807 197903 2001

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Juli 2013



Nama: Muhimmatus Sa'adah

NIM : 0910313116

## RINGKASAN

Muhimmatus Sa'adah, 2013, Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Daerah (Studi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan), Dr. imam Hardjanto, MBA,. MAP, Drs. RomulaAdiono, MAP, 122Hal+

---

Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan dan kelautan yang berperan strategis dalam pembangunan nasional dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sebagai penyedia bahan pangan, penyedia lapangan kerja, penyedia bahan baku industri, sumber devisa dan penjaga kelestarian lingkungan. Akan tetapi pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan kabupaten lamongan masih belum optimal, dimana kurangnya pengelolaan terhadap sumber daya tersebut. Untuk itu dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan menyusun strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan kabupaten lamongan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, program pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan kabupaten lamongan. Situs penelitiannya adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

Dalam pembahasan analisis tulisan ini menggunakan teori pembangunan, dimana dalam teori tersebut dijelaskan strategi pengelolaan yang berdampak kepada pembangunan ekonomi daerah. Teori-teori tersebut adalah paradigma pembangunan yang meliputi pertumbuhan, pertumbuhan dan pemerataan, pemberdayaan, dan pembangunan berkelanjutan.

Strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan kabupaten lamongan berdasarkan potensi yang dimiliki, yaitu pengembangan sumber daya manusia, Pengembangan sarana dan prasarana, dan Program pengembangan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Selain itu juga terdapat Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Dengan adanya strategi tersebut pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang ada dapat dioptimalkan sesuai dengan program-program yang telah dicanangkan.

## SUMMARY

MuhimmatusSa'adah, 2013. Strategy Optimization of the Management of Fisheries and Marine Resources of the Area (The Study on The Marine Fisheries Agency and Lamongan), Dr. Imam Hardjanto, MBA, MAP., Drs. RomulaAdiono, MAP 122Hal+

---

Lamongan had potential fisheries and marine who served in the strategic national development and economic growth as a driving force as food providers, providers of employment, industrial raw material providers, foreign sources and environmental sentinels. However, the utilization of fishery resources and marine Lamongan is still not optimal, where a lack of management of these resources. For the marine and Fisheries Agency Lamongan compiled a resource management strategy for fisheries and marine Lamongan.

The research method used is descriptive research with qualitative approach. His research focus includes the development of human resources, development of facilities and infrastructure, program development of fisheries and marine resources. As well as supporting factors and inhibitors in the management of fisheries and marine resources of Lamongan. His site is the Department of fisheries and marine Lamongan.

In the discussion of the analysis of this paper uses the theory of development, which in theory are explained that management strategies have an impact to the economic development of the region. Such theories are paradigms of development that includes growth, growth and equity, empowerment, and sustainable development.

Strategy optimization of the management of fisheries and marine resources of Lamongan based on potential, namely human resource development, Infrastructure Development, strategy development and programme management of fisheries and marine resources. In addition there is also a contributing factor and inhibiting factor in management of fisheries and marine resources. With the existence of the strategy management of fisheries and marine resources can be optimized in accordance with the program-a program has been launched.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Daerah (Studi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan)". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan baik dalam segi penyampaian materi maupun penuturan bahasa. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Bapak Dr. Imam Hardjanto, MBA,. MAP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, ditengah-tengah kesibukan beliau.

4. Bapak Drs. Romula Adiono, MAP selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ir. Suyatmoko, MMA, Bapak Drs. Abdullah Ubaid, MM, dan Seluruh staf Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
6. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, terutama Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk terjun di lingkungan masyarakat pada masa yang akan datang.
7. Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta mendoakan dalam keadaan suka dan duka.
8. Teman-teman angkatan 2009 yang telah memotivasi, mendukung serta membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang sangat berharga. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Malang, 10 Juli 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Otonomi Daerah .....	11
B. Administrasi Pembangunan	
1. Konsep Pembangunan .....	15
2. Paradigma Pembangunan .....	17
3. Pembangunan SektorPerikanan.....	19
C. Strategi	
1. Pengertian Strategi.....	21
2. Syarat-syarat Strategi.....	22
3. Manfaat Strategi .....	23
4. Tipe-tipe Strategi.....	24
5. Strategi Perikanan.....	26
D. Sumber Daya Alam	
1. Pengertian Sumber Daya Alam.....	29
2. Sumber Daya Perikanan .....	30

E. Sektor Kelautan dan Perikanan	
1. Sektor Kelautan.....	31
2. Sektor Perikanan.....	32
3. Pengelolaan Kelautan dan Perikanan.....	32
F. Optimalisasi.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Analisis Data.....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

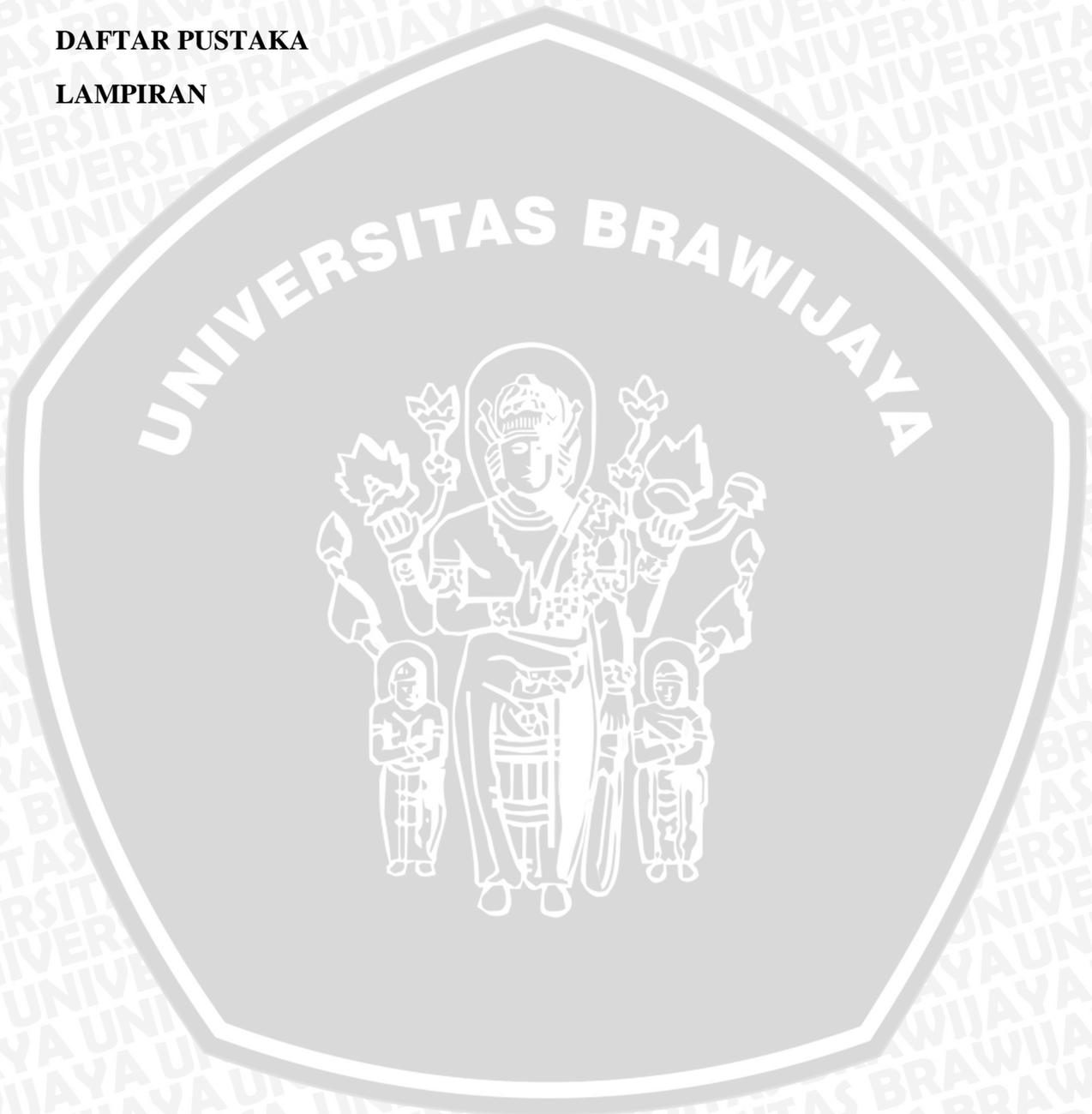
A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	
1. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan.....	46
2. Kondisi Demografis.....	47
3. Kondisi Ekonomi.....	48
4. Gambaran Umum Dinas Perikanan Dan Kelautan.....	53
5. Rencana Strategis.....	63
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dalam Pembangunan Perikanan	
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	68
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana.....	75
c. Program Pengembangan Pengelolaan.....	85
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	
a. Faktor Pendukung.....	100
b. Faktor Penghambat.....	101
C. Analisis Data Fokus Penelitian	
1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dalam Pembangunan Perikanan	
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	101
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana.....	103
c. Program Pengembangan Pengelolaan.....	106
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	
a. Faktor Pendukung.....	115
b. Faktor Penghambat.....	116

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Perkembangan produksi ikan.....	5
2.	Jenis dan jumlah prasarana perkantoran.....	60
3.	Data tanah yang dikuasaidan dikelola.....	62
4.	Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran.....	61
5.	Jenis dan jumlah prasarana perkantoran.....	62
6.	Sumber Daya SKPD.....	63
7.	Perkembangan tenaga kerja perikanan.....	69
8.	Kegiatan pelatihan dan ketrampilan nelayan dan pembudidaya.....	75
9.	Jumlah armada perikanan.....	78
10.	Jumlah alat tangkap.....	79
11.	Balai benih ikan.....	81
12.	Pengolahan usaha perikanan.....	84
13.	Produksiperikanansektorlaut.....	87
14.	Jenis ikan budidaya air payau.....	89
15.	Jumlah petani ikan budidaya air payau.....	90
16.	Jenis ikan budidaya ikan tawar.....	91
17.	Rekapitulasi data perikanan budidaya.....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Izin Penelitian
2. Lampiran Surat Keterangan Penelitian
3. Lampiran Curriculum Vitae



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, sumber daya laut dan pesisir sangat penting sebagai sumber kehidupan sebagian masyarakat dan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional, ditinjau dari sudut pandang ekonomis, kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis pantai panjang serta potensi kelautan, perikanan dan pesisir yang besar pada dasarnya harus mampu memberi kontribusi signifikan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Besarnya potensi kekayaan ekosistem di tanah air yang melimpah tersebut, ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Sudah seharusnya kekayaan tersebut mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pesisir (nelayan).

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai pekerjaan melaut untuk menangkap ikan. Sebagian masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, merupakan pengusaha skala kecil dan menengah. Banyak dari mereka yang bersifat subsistem. Mereka menjalani kegiatan ekonomi dengan skala kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Beberapa pakar ekonomi sumber daya berpendapat bahwa kemiskinan masyarakat pesisir khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya

serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan nelayan tetap hidup dalam kemiskinan dan sulit untuk bangkit (KKP, 2011).

Kehidupan masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan. Kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Kemiskinan struktural yang membelenggu nelayan tradisional di berbagai segi kehidupan telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju, selain itu juga masalah ketergantungan yang kuat terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Sehingga para nelayan dan buruh tidak dapat berbuat banyak atas proses marginalisasi yang dialaminya untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Sektor perikanan dan kelautan memegang peran strategis dalam perekonomian nasional dan daerah, bahkan dalam era reformasi dan otonomi daerah, sektor perikanan dan kelautan juga diharapkan dapat berperan di garis depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Sektor perikanan dan kelautan yang memiliki peran strategis, patut menjadi sektor andalan dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang dapat digambarkan sebagai penyedia bahan pangan, penyedia lapangan kerja, penyedia bahan baku industri, sumber devisa dan penjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan perikanan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan adanya otonomi daerah selanjutnya diatur sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembangunan perikanan merupakan basis dari ekonomi daerah, membutuhkan apresiasi tinggi dari

pemerintah daerah untuk memperhatikan pembangunan perikanan tanpa mengabaikan sinerginya dengan sektor lain. Untuk itu kebijakan pembangunan perikanan yang tepat disetiap daerah sangat diperlukan sehingga nilai tumbuh yang dihasilkan dapat lebih memberikan manfaat yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi saat ini terjadi berbagai permasalahan dihadapi dalam pembangunan perikanan yaitu diantaranya kurangnya wawasan sektor perikanan tangkap, fasilitas tangkap, pencemaran ekosistem, persaingan antar nelayan dengan alat tangkap modern, dan iklim.

Otonomi daerah di Indonesia merupakan pemberian hak wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Penegasan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwujudkan dalam perundang-undangan otonomi daerah, yaitu UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan titik berat pada demokrasi, pemerataan dan keadilan serta kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten atau kota memiliki wewenang pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberian kewenangan kepada daerah, bukan hanya pada proses administrasi politik berupa pelimpahan

wewenang pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun lebih merupakan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah, perlu bekerja sama antar pemerintah pusat, untuk memaksimalkan keanekaragaman dan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah melihat di dalam otonomi daerah terdapat: *sharing of power, distribution of income, dan empowering regional administration* (Warsito, 2003: 4). Ketiga hal inilah diharapkan oleh daerah agar pelaksanaan otonomi daerah akan mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah secara perlahan dapat dikurangi. Otonomi daerah memang lebih dikonsentrasikan pada daerah kabupaten atau kota hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah kabupaten/kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mendewasakan politik rakyat (*democratization process*), serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia maka peran pemerintah daerah menjadi sangat besar dalam membangun daerahnya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan daerah telah diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, tetapi tetap dalam kaidah otonomi daerah dan hubungan dengan pemerintah pusat. Selain itu juga menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Pemberian kewenangan yang besar kepada

daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Otonomi daerah juga merupakan peluang yang cukup besar bagi pemerintah kota atau kabupaten untuk mengembangkan perekonomian daerahnya sesuai potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah.

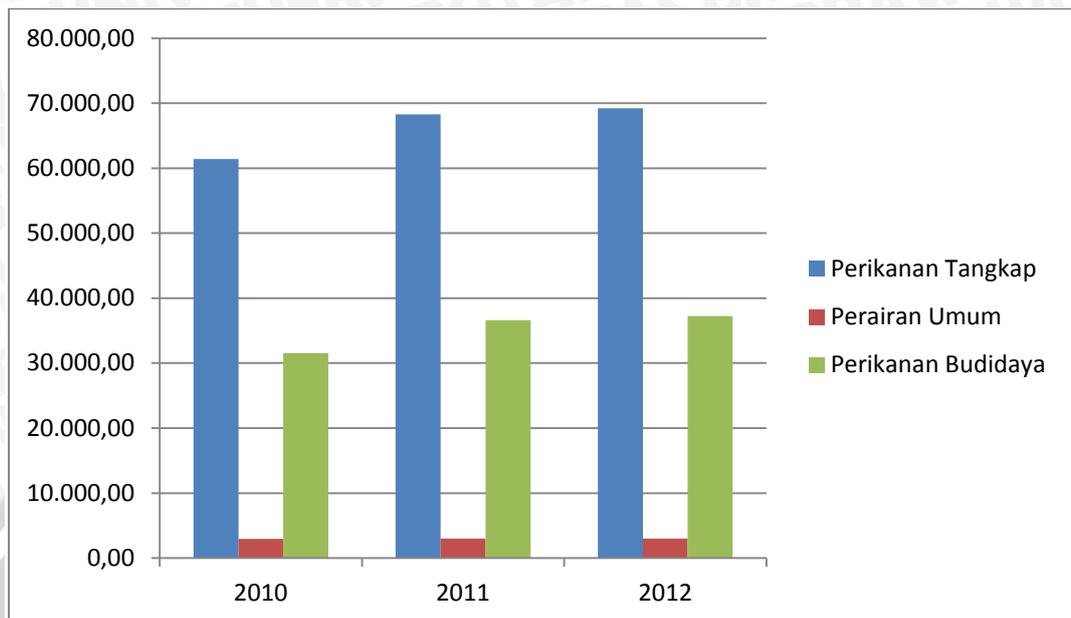
Kabupaten Lamongan yang pada hakekatnya adalah daerah otonom memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya serta membuat kebijakan terkait dengan perekonomian daerahnya. Pemerintah kabupaten Lamongan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus didorong sektor industri maupun perdagangan yang tergolong sektor hilir dalam sistem perekonomian. Lamongan dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, namun produksi yang besar itu tidak serta merta menunjukkan peningkatan kesejahteraan nelayan. Ikan yang dihasilkan sebagian besar dijual begitu saja tidak ada nilai tambah dan kualitas produksi olahan kurang (Banjarmasinpost.co.id).

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Produksi Ikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

Jenis Usaha	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Perikanan Tangkap	61.431,50	68.302,08	69.216,00
Perairan Umum	2.945,20	2.992,78	2.996,80
Perikanan Budidaya	31.561,20	36.628,77	37.245,17

*Sumber: dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan*



Berdasarkan letak geografis Kabupaten Lamongan memiliki panjang pantai 47 km, usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut Jawa pada wilayah kecamatan Brondong dan Paciran yang memiliki 5 pusat pendaratan ikan (PPI) sekaligus tempat pelelangan ikan (TPI) yaitu mulai arah barat ke timur (Lohgung yang berbatasan langsung dengan Tuban, Labuhan, Brondong, Kranji dan Weru yang berbatasan dengan kabupaten Gresik. Disamping TPI Kabupaten, Lamongan sejak tahun 1987 juga berdiri Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) yaitu dikenal dengan nama Pelabuhan Nusantara Brondong. Dilihat dari sudut sumberdaya perikanan, Kabupaten Lamongan mempunyai potensi yang cukup besar selain wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di Kabupaten Lamongan juga sangat cocok untuk di kembangkan budidaya air payau (tambak). Potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar tersebut memberikan keuntungan yang cukup besar pula, dimana dengan adanya kebijakan otonomi daerah Kabupaten Lamongan sepenuhnya dapat mengelola

sumber daya perikanan yang ada secara bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya perikanan diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang selama ini dirasakan belum optimal, dan nantinya juga diharapkan dapat menjadi tumpuan perekonomian di Kabupaten Lamongan yang dapat digunakan sebagai sumber biaya operasional pembangunan daerah setempat. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, maka sumber daya tersebut merupakan potensi daerah yang dapat memainkan peran penting dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana **“Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber daya Perikanan dan Kelautan Daerah (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan daerah yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten Lamongan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan daerah yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten Lamongan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi Dinas Perikanan dan Kelautan dalam meningkatkan pembangunan perikanan dalam meningkatkan sumber daya perikanan dan kelautan daerah:
- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada pembangunan perikanan dalam meningkatkan sumber daya perikanan dan kelautan daerah.

### D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai niali (value), baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Kegunaan Akademis  
Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan dunia administrasi publik, khususnya dalam hal pembangunan perikanan.
2. Sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pembangunan sektor perikanan.
3. Kegunaan praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor perikanan.

- b. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan didalam pengambilan keputusan yang tepat dan penentuan kebijakan bagi pembangunan perikanan.
- c. Sebagai bahan diskusi akademisi, praktisi dan peminat administrasi publik.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemkakan tentang alasan yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan permasalahan yang timbul, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian yang merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian. Metode penelitian ini

meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang atau data-data yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh penulis selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga terdapat gambaran umum mengenai lokasi dan situs penelitian dalam hal ini yaitu kabupaten Lamongan. Serta memuat pembahasan yang membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti selama penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari semua yang telah dibahas dan diuraikan berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis dan dianggap perlu guna menghasilkan keadaan yang lebih baik bagi instansi atau obyek yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi daerah

##### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi kata otonomi daerah berasal dari akar bahasa latin autos dan nomos (bahasa Yunani). Autos artinya sendiri dan nomos bermakna aturan. Sehingga gabungan kedua dari akar kata tersebut dimaknakan sebagai “memerintah sendiri” atau “pemerintahan sendiri” kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Kemudian apabila dihubungkan dengan daerah, maka akan menjadi otonomi daerah. Jadi dalam otonomi daerah, daerah berwenang membuat aturan-aturan yang berlaku dalam batas wilayah itu sendiri. Menurut undang-undang otonomi daerah No. 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian

isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (peraturan daerah) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada keuangan daerah, sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada didalam daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah.

Pada dasarnya otonomi daerah mendorong agar daerah berkewajiban untuk ikut melancarkan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Suatu hal yang perlu dikedepankan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standart pelayanan publik yang mudah, murah, dan cepat.

## B. Administrasi pembangunan

### 1. Konsep Pembangunan

Menurut Siagian (1999:4) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Siagian mengemukakan beberapa ide pokok dalam pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan;
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perncanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
- d. Pembangunan mengarah kepada modernitas;
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional;
- f. Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Proses pembangunan harus didukung administrasi yang baik dan benar agar pencatatan dan pengaturan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu yang pertama administrasi dan yang kedua pembangunan. Siagian (1999:4) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-

keputusan yang diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1999:5). Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka menurut Siagian administrasi pembangunan adalah keseluruhan usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut Riggs (1986:75), administrasi pembangunan merujuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1995:186), administrasi pembangunan adalah suatu pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk mendukung pencapaian pertumbuhan kearah satu keadaan yang dianggap lebih baik dikemudian hari. Tjokroamidjojo (1995:222) juga menyatakan bahwa administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dan kerjasama seluruh rakyat dalam proses pembangunan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa administrasi

pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat yang luas, sesuai dengan arah yang ditetapkan dalam proses pembangunan.

## 2. Paradigma pembangunan

Suryono (2004:15-25) mengemukakan beberapa paradigma pembangunan.

Paradigma pembangunan tersebut meliputi:

### 1. Pertumbuhan

Dimulai pada sekitar dasawarsa 1960-an, banyak Negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi “*growth priority*” yang memfokuskan diri pada akumulasi capital nasional dengan GNP (*Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilannya. Dengan ditingkatkan pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara dunia ketiga terpecahkan.

### 2. Pertumbuhan dengan pemerataan

Strategi ini terdiri dari empat pokok, yaitu:

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.
- b. Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
- c. Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung.
- d. Pengalihan harta atau tanah yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin. Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional.

### 3. Teknologi tepat guna

Pendekatan ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Pendekatan ini diyakini lebih sesuai untuk negara-negara berkembang karena melalui teknologi tepat guna ini maka sumber-sumber daya lokal yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan penduduk.

### 4. Kebutuhan dasar pembangunan

Konsep pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin, dengan kata lain adalah serangan langsung terhadap kemiskinan. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak

hanya terbatas pada papan, pakaian dan papan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan.

5. Pembangunan berkelanjutan

Menurut *World Commission* (1987) dari Suryono, pembangunan berkelanjutan adalah “suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang”.

6. Konsep pemberdayaan

Friedmann (1992) dari Suryono, mengemukakan konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

7. Pembangunan berpusat pada manusia

Menurut Korten (1984), pembangunan yang berpusat pada manusia, atau disebut juga dengan pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya.

Menurut Suryono (2004:83-84), konsep pembangunan mempunyai kaitan kuat dengan sistem nilai, gerakan, mode, strategi, dan indikator yang menjadi dominan setiap negara berkembang. Beliau menyatakan bahwa pembangunan sebagai sebuah sistem mencakup:

- a) Komponen masukan, terdiri dari nilai, sumber daya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat, komponen proses terdiri dari organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan.
- b) Komponen keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Pembangunan sebagai gerakan mengandung makna bahwa

pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat. Pembangunan sebagai metode berorientasi pada upaya penciptaan kemajuan sosial ekonomi yang didukung oleh pengorganisasian dan peran serta masyarakat selaku subyek pembangunan. Sedangkan pembangunan sebagai strategi berorientasi pada:

- a. Pendekatan kebutuhan dasar untuk mayoritas kaum miskin melalui peningkatan pelayanan sosial.
- b. Penekanan pada distribusi pertumbuhan sebagai indikator pembangunan.
- c. Pertanian sebagai sektor prioritas ekonomi dan pemberian kredit informasi, input, dan infrastruktur pasar bagi masyarakat miskin.
- d. Teknologi padat karya dan tepat guna.
- e. Penekanan pada aspek sosial, politik dan ekonomi dari pembangunan.

### **3. Pembangunan Sektor Perikanan**

Menurut Banoewidjojo (1987) pembangunan perikanan adalah semua usaha dibidang perikanan yang senantiasa menciptakan perubahan-perubahan struktur sosial, khususnya yang menyangkut masarakat nelayan dan petani ikan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berasal dari bidang perikanan. Rencana Strategis (RENSTRA) DKP 2002-2004 menekankan pertumbuhan ekonomi pada bidang kelautan dan perikanan dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dengan sekaligus memelihara daya dukungnya.

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah “Ekosistem laut dan perairan tawar beserta segenap sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dipelihara kelestariannya, dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia” (Dahuri 2002). Ada tiga hal pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan perikanan di Indonesia, yaitu: 1) mempertahankan sustanibilitas, 2) meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan (termasuk industri yang menangani komoditas ikan), 3) menghasilkan pemasukan Negara (Herunawati, 2002).

Sebagaimana tujuan pembangunan nasional dalam Tribawono (2002) dijelaskan bahwa yang diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia maka sumber daya ikan merupakan suatu modal dasar pelaksanaan pembangunan nasional. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan maka pengaturan perikanan harus memberikan ladasan yang kuat untuk:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masarakat nelayan dan petani ikan.
2. Mencukupi kebutuhan protein hewani (khusus ikan) dan sekaligus dapat memberikan motivasi dan semangat kepada nelayan dan petani ikan dalam peningkatan produksinya.
3. Mendorong peningkatan ekspor nonmigas yang berasal dari perikanan ke mancanegara

#### 4. Memberikan kesempatan kerja lebih luas untuk menampung kerja produktif.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan daratan (*continental oriented*) dibandingkan pembangunan yang berorientasi lautan (*ocean oriented*) berakibat pada kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor perikanan. Akibatnya secara kelembagaan perikanan berada pada level subsektor, sehingga kebijakan pembangunan perikanan selalu terpinggirkan dibandingkan sektor lainya karena secara kelembagaan perikanan tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat (Bakar, 2002).

### C. Strategi

#### 1. Pengertian Strategi

Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi privat mempunyai sejumlah langkah atau cara yang tersusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktivitas kegiatan. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang dituangkan dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rangkaian suatu perencanaan suatu kegiatan yang meliputi berbagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi menurut Siagian (2002:17) adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Strategi adalah hal menetapkan arah kepada manajemen dalam arti orang tentang sumber daya didalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan didalam pasar ( Dirgantoro, 2001: 15).

## 2. Syarat-Syarat Strategi

Orientasi strategi bertumpu pada implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Strategi yang dirumuskan harus mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan dipihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut.
- c. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolok ukur tepat tidaknya strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya (Siagian, 2002:102-103).

Penyusunan strategi dalam sebuah organisasi harus memenuhi syarat yang diperlukan agar strategi berjalan optimal dan dapat menunjang kelangsungan hidup organisasi (*viability*). Penentuan faktor-faktor berupa

peluang (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*) bagi organisasi yang diprediksi akan terjadi pada waktu depan harus ditentukan secara tepat untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan ancaman. Identifikasi sumber daya yang dimiliki organisasi harus diperhitungkan dengan tepat karena hal ini akan mempunyai implikasi pada kemampuan organisasi dalam merencanakan strategi.

### 3. Manfaat Strategi

Strategi ditetapkan oleh suatu organisasi sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rantai kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. David (2002:15) mengungkapkan manfaat dari strategi pada organisasi antara lain:

- a. Aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan.
- b. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis.
- c. Strategi merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua manajer dan karyawan.
- d. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja karyawan.

- e. Strategi memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.
- f. Penerapan strategi membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka dan meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal/ luar perusahaan serta pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pesaing.

Strategi memungkinkan organisasi untuk lebih proaktif ketimbang reaktif dalam membentuk masa depan sendiri dan membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Hal tersebut memungkinkan suatu organisasi untuk mengawasi dan mempengaruhi aktifitas sehingga dapat mengendalikan tujuannya sendiri. Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah dimasa datang dan aktifitas yang tumpang tindih akan dikurangi.

Suatu organisasi yang menggunakan pedoman strategi sebagai suatu kerangka kerja (*framework*) untuk menyelesaikan setiap masalah tidak akan merasa bingung dalam berpijak karena sudah mempunyai garis besar rencana organisasi ke depan yang penjabarannya melalui strategi. Organisasi menjadi lebih efektif dengan mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.

#### **4. Tipe-tipe Strategi**

Selama ini organisasi/perusahaan dihadapkan pada keharusan untuk berhadapan dengan sejumlah ketentuan dan masalah baru. Organisasi dituntut cepat tanggap terhadap persaingan dan perubahan. Strategi yang tepat sangat

menentukan keberhasilan organisasi pada masa depan. Upaya menjadi yang terunggul dan terbaik melalui peningkatan kompetensi menjadi keniscayaan yang tidak dapat dielakkan bila masih ingin tetap bertahan. Organisasi dituntut untuk dapat memilih dan memilah berbagai konsepsi strategi yang ditawarkan. Suatu konsep yang telah diimplementasikan memberi hasil optimal pada suatu masa, harus dikaji ulang ketika konteks persaingan berubah. Menurut Kooten dalam Salusu (1996:104-105) tipe-tipe strategi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi), strategi ini berkaitan dengan perumusan, misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif yang diperlukan yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Programe Strategy* (strategi program), strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi pada suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi organisasi.
- c. *Resorce Report Strategy* (strategi pendukung sumber daya), strategi sumber daya memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas esensial kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
- d. *Institusional Strategy* (strategi kelembagaan), focus dari strategi institusional adalah menegmbangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Strategi merupakan tindakan yang *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan menurut sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan mulai dari apa yang akan terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi yang baru dan perubahan pola pelanggan memerlukan kompetensi adaptif yang baik dari suatu strategi.

Strategi yang harus diterapkan pada organisasi harus disesuaikan dengan ukuran, karakter dan kemampuan organisasi. Pada organisasi yang telah melakukan perumusan strategi yang matang pada umumnya menitikberatkan pada upaya membangun keunggulan pada setiap bidang usaha yang digeluti organisasi. Setiap organisasi yang sukses akan menyokong sejumlah dasar pemikiran baru atau inisiatif-inisiatif strategi baru. Hal ini merupakan fakta hidup tentang diversifikasi pada sebuah organisasi. Fakta ini tidak dapat diubah, dan bila tidak diindahkan akan menjelaskan mengapa strategi mengalami kegagalan.

## 5. Strategi perikanan

Pembangunan perikanan dan kelautan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, industri kelautan (seperti industri maritim, perikanan, wisata bahari) yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan, maka guna mendukung hal tersebut ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a. *Pro poor* (Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan)

Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

b. *Pro job* (Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja)

Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

c. *Pro growth* (Keberpihakan kepada pertumbuhan)

Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

d. *Pro sustainability* (Keberpihakan kepada lingkungan hidup)

Pendekatan *pro-sustainability* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

e. *Pro Environment* (Keberpihakan kepada pemulihan/ramah lingkungan)

Pendekatan *pro-environment* dilakukan melalui upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur).

Strategi Utama Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Kebijakan, visi, dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dengan strategi utama sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terintegrasi;
  - a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.
  - b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat
  - c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
  - a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal danberkelanjutan.
  - b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.
  - c. Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
  - d. Indonesia bebas *Illegal, Unreported & Unregulated* (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan;
  - a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.

- b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
  - c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.
4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional.
    - a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
    - b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan (KKP, 2011).

#### **D. Sumber Daya Alam**

##### **1. Pengertian Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam adalah segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Dengan perkataan lain sumber daya alam adalah faktor produksi dan alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi (Fauzi, 2004).

Sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya. Dengan kata lain sumber daya adalah berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam suatu proses produksi atau aktifitas ekonomi seperti modal, tenaga manusia, energi, air,

mineral, dan lain-lain. Dengan demikian sumber daya mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu, dan tempat (Reksohadiprojo, 1985: 6-7).

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu: 1) berbagai sumber daya alam seperti air, ikan, minyak bumi dan lain-lain; 2) tata lingkungan fisik seperti pantai berpasir, tanah yang subur dan sebagainya. Dengan didasarkan pada pengertian sumber daya (*resources*) adalah berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam satu proses produksi atau aktiva ekonomi seperti modal, tenaga manusia, energi, air mineral, dan lain-lain. Ditambahkan lagi bahwa beberapa sifat khusus dari sumber daya alam yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa penyebaran sumber daya alam tidak merata dan sifat saling ketergantungan antar sumber daya alam (Katili, 1983: 15-18).

## **2. Sumber Daya Perikanan**

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang dimaksud perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sumber daya perikanan terdiri dari sumber daya ikan, sumber daya lingkungan serta segala sumber daya ikan. Oleh karena itu adanya pengelolaan atau manajemen sumber daya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumber daya ikan, pengelolaan lingkungannya serta pengelolaan kegiatan manusia (Victor, 2002).

## E. Sektor Kelautan Dan Perikanan

### 1. Sektor kelautan

Menurut Kusumastanto (2002), sektor kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan lingkungannya. Sektor kelautan mencakup kegiatan-kegiatan pemanfaatan, penambangan, angkutan dan jasa-jasa lainnya yang berada di wilayah pesisir maupun di lautan, termasuk kegiatan industri kemaritiman.

Menurut Mariana Kusumasyanti (2009), sumber daya kelautan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sumber daya dapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, sumber energi, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.

#### a. Sumber daya dapat pulih

Potensi sumber daya dapat pulih terdiri dari sumber daya perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan bioteknologi kelautan.

#### b. Sumber daya tidak dapat pulih

Sumber daya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi.

#### c. Energi kelautan

Energi kelautan merupakan energi non-konvensional dan termasuk sumber daya kelautan non hayati yang dapat diperbaharui yang memiliki potensi untuk dikembangkan dikawasan pesisir dan lautan Indonesia.

#### d. Jasa kelautan

Pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan juga dapat dilakukan terhadap jasa-jasa lingkungan, terutama untuk pengembangan pariwisata dan pelayaran.

## 2. Sektor perikanan

Menurut Undang-undang No. 31 tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sedangkan menurut Subade dan Nik (1993) dalam soemokaryo (2001:13), perikanan adalah sumber daya bebas-masuk semua orang (*open acces resource*), dimana pengguna boleh masuk secara tak terbatas untuk bersaing yang bisa mengantarkan pada *overfishing* atau over-eksploitasi dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

## 3. Pengelolaan kelautan dan perikanan

Menurut Undang-undang No. 31 tahun 2004, pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, lokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Undang-undang No. 31 tahun 2004 juga menerangkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
- c. Mendorog perluasan dan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
- i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pengelolaan sumber daya perikanan (sumber daya laut dan pesisir) merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena sumber daya perikanan sangat rentan dan sensitive terhadap banyak perubahan. Khusus untuk sumber daya ikan, kerentanan dan sensifitasnya semakin tinggi karena merupakan sumber daya hayati yang banyak dipengaruhi oeh perubahan-perubahan eksternal dan internal, yaitu perubahan yang terjadi disekitar atau tempat yang jauh dari ekosistem atau perubahan yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan ekosistem, serta perubahan lingkungan biotik maupun abiotik. Selain itu faktor manusia merupakan variabel penting yang menentukan status pemanfaatan dan potensi sumber daya perikanan (Victor, 2002).

Undang-undang tentang perikanan telah menyebutkan batas wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia
- b. ZEEI (Zona Eksklusif Ekonomi)
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Cholik (2006:3), struktur sumber daya perikanan diuraikan menurut perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber perikanan tangkap mencakup perikanan laut dan perikanan umum. Termasuk sumber daya perikanan laut adalah panjang garis pantai, luas terumbu karang, padang lamun, laut dalam dan laut dangkal. Sedangkan yang termasuk sumber daya perikanan perairan umum adalah sungai, rawa, danau, waduk dan saluran irigasi. Sumber daya perikanan budidaya mencakup lingkungan sumber daya perairan air tawar, payau, dan laut.

- a. Budidaya perikanan

Menurut Soeseno (1985:1) dikalangan pertanian istilah budidaya digunakan bagi kegiatan usaha produksi suatu komoditi. Budidaya ikan meliputi baik usaha dikolam air tawar, maupun air payau. Kegiatan berupa “membudayakan” ikan, yang dulunya hidup liar, menjadi ikan kultur (piaraan). Sedangkan Rahardi (2003:19), menjelaskan tentang pengertian budidaya perikanan dalam arti sempit dan pengertian luas yaitu usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup secara liar di alam menjadi ikan

piaraan. Sedangkan dalam pengertian luas, semua usaha membesarkan dan memperoleh ikan, baik ikan itu masih hidup liar di alam atau yang sudah dibuatkan tempat tersendiri, dengan adanya campur tangan manusia. Jadi pengertian budidaya tidak hanya memelihara ikan dikolam, tambak, empang, akuarium, sawah, dan sebagainya. Namun, secara luas pengertian ini mencakup juga kegiatan mengusahakan komoditi perikanan di danau, sungai, waduk, atau laut. Tujuan budidaya perikanan yaitu untuk mendapatkan produksi perikanan yang lebih banyak dibandingkan dengan hasil dari perikanan yang hidup dialam secara liar.

Dalam perikanan darat, terdapat kegiatan pembudidayaan perikanan. Dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 disebutkan bahwa pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

b. Pemasaran Perikanan

Menurut Koetler dari Hartono (2010:8), pemasaran adalah proses sosial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan apa yang diinginkannya melalui penciptaan, penawaran, dan tukar-menukar barang dan jasa secara bebas. Sedangkan menurut Rahardi (2003:45), pengertian pasar secara luas adalah suatu kondisi dimana pembeli dan penjual dapat

berhubungan. Banyak sekali jenis pasar yang dapat digunakan sebagai tempat menyalurkan produksi perikanan, antara lain pasar umum, tempat pelelangan ikan, pasar swalayan, pasar khusus dan pasar ekspor.

#### **F. Optimalisasi**

Optimalisasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu upaya atau proses untuk menjadikannya optimal. Sedangkan pengertian optimal adalah upaya untuk mencapai hasil yang setinggi-tingginya dengan memanfaatkan peluang yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi akan selalu merujuk pada studi permasalahan yang mencoba mencari nilai minimal atau maksimal dari kasus tersebut ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)). Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan optimalisasi adalah cara yang paling tepat digunakan dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu usaha pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode tertentu, cara yang hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab apa yang dipermasalahkan. Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan memainkan peranan penting dalam membangun ilmu pengetahuan itu sendiri (Bungin, 2010). Penelitian berfungsi sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan melindunginya dari kepunahan. Metode penelitian yang tepat dalam penelitian dapat menjamin validitas atau keakuratan data dan kebenaran hasil penelitian. Metode penelitian mengarahkan peneliti untuk mengikuti serta menginterpretasikan data, sehingga dengan demikian maka tujuan penelitian dapat dicapai melalui prosedur yang sistematis dengan pembuktian-pembuktian yang meyakinkan.

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Bungin, 2010). Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data

tersebut. Penelitian ini bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berfikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif: atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Pendekatan ini dipilih karena pertimbangan bahwa penulis ingin memperoleh gambaran tentang strategi optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan kabupaten Lamongan.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahan yang dikajinya. Penelitian kualitatif bekerja di dalam setting alamiah, berupaya memahami dan memberikan penjelasan terhadap fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang terhadap fenomena tersebut. Penelitian kualitatif menggabungkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual, serta menggambarkan momen rutin dan problematik, serta makna dalam kehidupan individual dan kolektif (Bungin,2010).

## B. Fokus Penelitian

Di dalam rangka menjawab dan mengkaji masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, maka penemuan fokus penelitian menjadi sangat perlu. Tujuan adanya fokus penelitian (Moleong, 2000)

1. Membatasi masalah penelitian
2. Untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Oleh karena itu, fokus penelitian sangat penting peranannya dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Mengingat banyaknya masalah yang dapat dibahas berkaitan dengan strategi pembangunan perikanan, maka agar lebih terarah, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dalam pembangunan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Antara lain:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana
  - c. Program pengembangan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan dalam strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.
  - a. Faktor penghambat,
  - b. Faktor pendukung.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian, lokasi yang diambil adalah kabupaten Lamongan. Alasan peneliti memilih kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut memiliki potensi perikanan tinggi namun kesejahteraan masih minim.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa pada bagian ini akan diperoleh validasi dan aktualisasi data yang berhubungan dengan penelitian. Sesuai dengan maksud tersebut maka situs yang terkait dengan obyek yang akan diteliti adalah kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, Jl. Sumargo No. 2 Lamongan.

### D. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang penting di dalam penentuan metode pengumpulan data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut sangat penting dan diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan

data yang akan dikumpulkan, agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Uraian jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer yang diperoleh dari obyek penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan aparat pemerintah yaitu dengan pejabat yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan di kabupaten Lamongan, yaitu diantaranya

- 1) Kepala/staff Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.
- 2) Pihak-pihak yang dapat dijadikan nara sumber dan ada relevansinya dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber asli. Yang mana data atau informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti: dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diambil dari rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan dilakukan triangulasi dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, jurnal-jurnal, dan sumber lain.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan

untuk menjawab sekaligus memecahkan permasalahan yang ada. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

1) Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. (Moleong, 2000: 136) dengan mengatakan wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dimana peneliti bertemu langsung dengan subyek yang akan diteliti dengan mengajukan wawancara kepada informan.

2) Dokumentasi

Yang dimaksud dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan meneliti dan mempelajari catatan-catatan, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip serta dari media yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti akan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembangunan perikanan di kabupaten Lamongan.

## F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moleong, 2002:44). Instrument

penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan penelitian sendiri dengan kemampuan yang ada terhadap obyek yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Pedoman wawancara (Interview guide)

Merupakan suatu petunjuk atau pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan wawancara langsung dengan informan.

3. Catatan lapangan (field note)

Catatan lapangan ialah catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh selama melakukan wawancara maupun penelitian dilapangan.

4. Alat-alat tulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal yang penting di lapangan.

## **G. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisa interaktif. Proses analisis model ini mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Sehingga proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan-batasan kronologis. Komponen-komponen analisis data secara

interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Model ini dikembangkan oleh Miles (2009), yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Penarikan kesimpulan (verifikasi data) dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan tujuan penelitian, analisa terhadap data-data ialah ketika peneliti berada dilapangan (bersamaan dengan pengumpulan data) sampai dengan pembuatan laporan penelitian, karena penelitian kualitatif adalah bentuk siklus, yaitu setiap informasi baru harus diikuti perkembangannya sebagai data terbaru untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena dilapangan. Jadi analisa

data merupakan proses kegiatan penganalisaan dari data-data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya diuraikan, diinterpretasikan dan diverifikasikan untuk menarik kesimpulan sehingga akan memperoleh makna dan hasil sebagaimana mestinya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Lamongan

Secara geografis kabupaten lamongan terletak pada 6 sampai dengan lintang selatan dan diantara garis bujur timur 122 sampai 122. Kabupaten lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km<sup>2</sup> atau  $\pm$  3.78% dari luas wilayah propinsi jawa timur. Dengan pantai garis panjang sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut kabupaten lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 2 mil dari permukaan laut. Daratan kabupaten lamongan dibelah oleh sungai bengawan solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu;
2. Bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro;
3. Bagian tengah utara merupakan daerah bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Batas wilayah administratif kabupaten lamongan adalah: sebelah utara perbatasan dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan gresik, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten jombang dan mojosuro, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tuban dan kabupaten bojonegoro. Kondisi topografi kabupaten lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah diatas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian diatas 100 meter diatas permukaan air laut.

Jika dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah kabupaten lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5 lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangan, Mantup, Sugio Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

## 2. Kondisi Demografis

Menurut data survey sensus ekonomi nasional (susenas) provinsi jawa timur 2005 jumlah penduduk kabupaten lamongan tahun 2005 sebanyak 1.261,972 jiwa, terdiri dari 646.830 jiwa (51,26%) perempuan dan 615.142 jiwa (48,74%) laki-laki. Dengan komposisi kelompok umur berdasarkan jenis kelamin laki-laki usia 0-14 tahun sebanyak 170.087 jiwa (27,65%), usia 15-64

tahun sebanyak 407.040 jiwa (66,17%), dan usia diatas 65 tahun sebanyak 59.121 jiwa(9,14%), sehingga jumlah penduduk kabupaten lamongan secara keseluruhan berdasarkan kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 321.704 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 843.132 jiwa, dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 97. 136 jiwa.

Banyaknya pencari kerja tamatan SD yang terdaftar sebanyak 55 orang, tamatan SMP sebanyak 216 orang, tamatan SMA / sederajat sebanyak 5.371 orang. Tamatan diploma I/II/III sebanyak 2.125 orang, tamatan sarjana sebanyak 3.419 orang. Adapun pemenuhan kerja menurut sector gas, listrik, dan air 186 orang, bangunan 242 orang, perdagangan 417 orang, angkutan 240 orang, bank dan keuangan 78 orang, dan jasa-jasa 2.351 orang.

### **3. Kondisi Ekonomi**

#### **a. Potensi unggulan daerah**

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian/ pembangunan daerah pada wilayah tersebut. Hal ni tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada dikabupaten lamongan.

Hasil analisa komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) melalui indeks dominasi antar daerah di

propinsi jawa timur (38 kabupaten/kota) dengan menggunakan dua indikator utama yaitu Statis Location Quotion (SLQ) dan Dynamic Location Quotion (DLQ), maka dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah di kabupaten lamongan. Adapun sektor unggulan kabupaten lamongan antara lain:

1. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan;
2. Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industry tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan);
3. Sektor bangunan atau konstruksi;
4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel);
5. Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta
6. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).

Selain berdasarkan hasil analisa diatas, potensi unggulan suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan daerah kabupaten lamongan disektor pertanian khususnya Nampak pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perikanan. Dengan total baku lahan sawah seluas 83.213 hektar (sekitar 7,23% dari total jawa timur kabupaten lamongan pada tahun 2006 mampu memberi kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton GKG (7,14%) dari total produksi gabah di jawa timur atau terbesar kedua di jawa timur). Kabupaten lamongan juga merupakan penghasil nomor 5 (lima) terbesar di jawa timur untuk komoditi jagung , yaitu sebesar 5,61% dari total di jawa timur.

Sedangkan untuk sub sektor perikanan, kabupaten lamongan mampu member kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di jawa timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di jawa timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton senilai kurang lebih Rp.446 milyar. Kontribusi terbesar produksi ikan di kabupaten lamongan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) dan produksi perikanan laut. Perikanan sawah tambak yang didukung areal 22.422,29 hektar mampu memberikan produksi ikan tawar terbesar di jawa timur, sedangkan perikanan laut yang didukung 19.994 nelayan dan 5.385 armada kapal penangkap ikan mampu menghasilkan produksi ikan terbesar nomor 3 (tiga) di jawa timur setelah kabupaten sumenep dan probolinggo.

Sedangkan untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan suatu perkembangan yang nyata/significant untuk memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perekonomian daerah kabupaten lamongan. Pembangunan wisata bahari (WBL) nampak nyata memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sector ini terhadap PDRB. Dengan kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 850.000 per tahun merupakan suatu potensi daerah yang besar untuk terus dikembangkan dan disinergikan dengan obyek wisata lainnya seperti wisata religi/ziarah makam sunan drajat dan goa maharani. Keberadaan WBL juga secara tidak langsung memberikan multiplayer effect terhadap kembang tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif lainnya di masyarakat. Pada tahun 2006 sub sektor hiburan dan rekreasi mampu tumbuh sebesar 5,23%.

Melalui pemikiran yang berwawasan luas (regional dan nasional) yang didukung dengan pemahaman bahwa potensi ekonomi daerah bukanlah sekedar apa yang terkandung dan tersedia di daerah tersebut tetapi juga meliputi potensi ekonomi diluar teritori wilayah lamongan yang dapat mendatangkan manfaat bagi lamongan. Melalui riset peta potensi unggulan daerah baik yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal-luar daerah, propinsi bahkan nasional disertai dengan strategi pemasaran daerah, kabupaten laomongan memanfaatkan peluang dan potensi tersebut demi terwujudnya kemajuan perekonomian daerah dan masyarakat lamongan. Wilayah kabupaten lamongan yang memiliki letak strategis diantara pusat-pusat pertumbuhan di jawa timur merupakan potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan dalam rangka pengembangan wilayah. Model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kutub pertumbuhan (*Growth Pole Approach*), yaitu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) khususnya di wilayah pantura dengan pihak investor merupakan strategi yang telah dikembangkan selama beberapa tahun ini. Diharapkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut bisa menjadi *engine of growth* dari perekonomian kabupaten lamongan secara keseluruhan tanpa mengesampingkan pengembangan wilayah lainnya.

#### **b. Pertumbuhan ekonomi / PDRB**

Nilai total PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) kabupaten lamongan pada tahun 2006 (yang masih merupakan angka estimasi/sangat sementara) adalah sebesar Rp. 4,082 Triliun. Sedangkan berdasarkan atas dasar berlaku (ADHB), PDRB kabupaten lamongan mencapai Rp. 5,782 triliun atau

meningkat sebesar 10,24% dibandingkan tahun 2005 dimana sebesar Rp. 2,283 triliun disumbangkan oleh sektor pertanian.

Perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah adapat dilihat dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai tiap tahunnya. Pertumbuhan perekonomian kabupaten lamongan pada tahun 2006 mencapai 5,11%. Pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir (2002 s/d 2006) menunjukkan pola kecenderungan yang semakin meningkat. Namun demikian pola pertumbuhan ekonomi tersebut disadari masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi jawa timur dan nasional yang pada tahun 2006 mencapai 5,5%.

Struktur perekonomian kabupaten lamongan yang masih besar ditopang pertanian mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah rata-rata jawa timur dan nasional. Persoalan struktural yang dialami sektor pertanian selama ini mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh sektor pertanian selama kurun waktu 2002-2006 relatif stagnan, dimana pada tahun 2006 hanya tumbuh sebesar 1,72%, paling rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan nilai tambah produk-produk komoditi pertanian pada tahun-tahun mendatang melalui pengembangan kegiatan pengolahan hasil komoditi pertanian (industri pengolahan berbasis pertanian) menjadi salah satu pemecahannya.

Berdasarkan data perkembangan selama 5(lima) tahun terakhir (2002 s/d 2006) struktur perekonomian kabupaten lamongan masih belum banyak mengalami perubahan yaitu masih ditopang utamaya oleh sektor primer (khususnya oleh sektor pertanian). Meski demikian peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan semakin menurun, sedangkan sektor tersier (khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar yaitu 43,22% terhadap total PDRB AHK kabupaten lamongan, kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (29,8%), dan sektor jasa-jasa (11,48%), dan sektor industri pengolahan sebesar 5,51%.

#### **4. Gambaran Umum Dinas Perikanan Dan Kelautan**

##### **a. Tugas dan Fungsi**

Dinas Perikanan dan Kelautan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 03 tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Lamongan nomor 32 tahun 2008, tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

- Kedudukan tugas dinas perikanan dan kelautan

Dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan.

➤ Fungsi dinas perikanan dan kelautan

Dalam melaksanakan tugas, dinas perikanan dan kelautan mempunyai fungsi yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Susunan Organisasi**

Adapun susunan organisasi dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
3. Kepala bidang perikanan tangkap

- a. Kasi eksploitasi dan teknologi
- b. Kasi prasarana penangkapan
- c. Kasi tata operasional BBI
4. Kepala bidang perikanan budidaya
  - a. Kasi produksi
  - b. Kasi sarana dan prasarana budidaya
  - c. Kasi kesehatan ikan dan lingkungan
5. Kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP)
  - a. Kasi pengembangan dan permodalan
  - b. Kasi pembinaan mutu dan pengolahan
  - c. Kasi perijinan usaha
6. Kepala bidang pengawasan
  - a. Kasi tata ruang pesisir dan kelautan
  - b. Kasi pemberdayaan masyarakat pesisir
  - c. Kasi pengawasan dan pengendalian
7. Unit pelaksana teknis dinas
8. Kelompok jabatan fungsional

Selanjutnya masing-masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Kepala Dinas**, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan, dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan.
- **Sekretariat**, unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan

bertugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program. Berdasarkan pasal 8 perda no. 32 tahun 2008 sekretariat terdiri dari tiga yaitu sub bagian umum, sub bagian keuangan, sub bagian program dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang dapat dijelaskan sesuai pasal 9 sebagai berikut:

- **Sub Bagian Umum** memiliki tugas:
  - ◆ Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan tata usaha kearsipan;
  - ◆ Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
  - ◆ Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat dinas;
  - ◆ Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
  - ◆ Melaksanakan pengolahan urusan organisasi dan tatalaksana;
  - ◆ Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  - ◆ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas:
  - ◆ Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
  - ◆ Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya;

- ◆ Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- ◆ Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;
- ◆ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

◦ **Sub Bagian Program**, mempunyai tugas:

- ◆ Mengumpulkan, menginventarisir, dan mensistemkan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan dinas;
- ◆ Mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program dinas;
- ◆ Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas;
- ◆ Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan rapat koordinasi dinas;
- ◆ Menyusun program dan rencana kegiatan dinas;
- ◆ Menyusun rencana anggaran dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan dinas bersama sub bagian/seksi terkait;
- ◆ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- ◆ Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya;
- ◆ Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa/diolah;

- ◆ Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistic;
  - ◆ Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  - ◆ Menyiapkan bahan publikasi program dan hasilnya bagi masyarakat luas;
  - ◆ Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas;
  - ◆ Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- **Bidang Perikanan Budidaya**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang perikanan budidaya melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.
  - **Bidang Perikanan Tangkap**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang perikanan tangkap melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI.

- **Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis bidang konservasi, tata ruang, pesisir dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian.
- **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis bidang pemasaran, permodalan, pembinaan mutu, pengolahan ikan, dan perijinan usaha.

**c. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana penunjang terhadap kebutuhan dan tugas-tugas pokok dan fungsi dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan secara minimal telah tercukupi, namun untuk pelaksanaan kedepan untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang kelautan dan perikanan, maka perlu ditunjang dengan adanya prasarana pendukung. Adapun sarana dan prasarana dinas terdiri dari:

### a. Sarana Perkantoran

Jumlah dan jenis sarana perkantoran berupa peralatan mesin pada dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**

**Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Dinas Perikanan dan Kelautan  
Kabupaten Lamongan 2012**

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1	Komputer PC	10	10	-	
2	Air Conditioning	7	7	-	
3	Filling Cabinet	3	3	-	
4	Meja Kerja	41	41	-	
5	Meja Rapat	2	2	-	
6	Rak Besi	2	2	-	
7	Kursi Kerja Eselon IV	4	4	-	
8	Kursi Kerja Eselon III	1	1	-	
9	Buffet Kaca	2	2	-	
10	Almari	7	7	-	
11	Meja Komputer	8	8	-	
12	Kursi Staff	12	12	-	
13	Kursi Rapat/Plastic	50	50	-	
14	Kursi Lipat	28	28	-	
15	Laptop	3	3	-	
16	Notebook	11	11	-	

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan*

Untuk tanah yang dikuasai dan dikelola dinas perikanan dan kelautan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**

**Data Tanah Yang Dikuasai Dan Dikelola Dinas Perikanan Dan Kelautan  
Kabupaten Lamongan tahun 2012**

No.	Jenis tanah	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi
1	Tanah kantor	9.150	Kab. Lamongan
2	Lahan BBI Kalen	8.000	Kec. Kedungpring
3	Lahan BBI Karanggeneng	7.000	Kec. Karanggeneng
4	Lahan BBI Sidoharjo	10.000	Kelurahan Sidoharjo
5	Lahan Dempond Rejosari Deket	11.690	Kec. Deket

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan*

**b. Prasarana Perkantoran**

Untuk jumlah dan jenis prasarana perkantoran berupa peralatan dan mesin pada dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

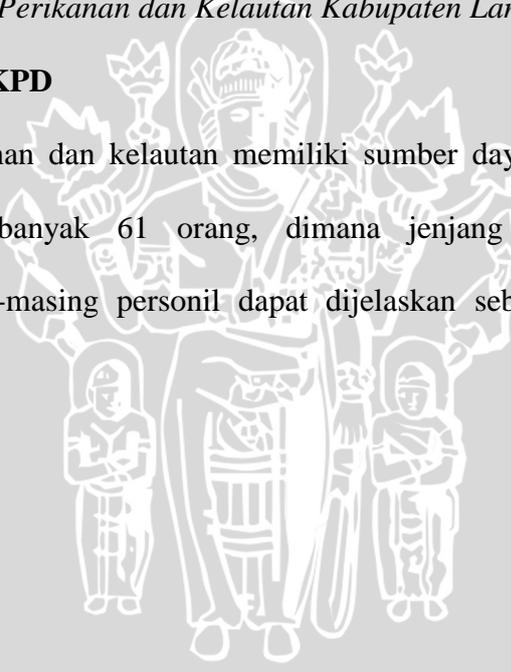
**Jenis dan Jumlah Prasarana Perkantoran Dinas Perikanan dan Kelautan  
Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Station Wagon	3	3	-	
2	Pick Up	2	2	-	
3	Sepeda Motor	20	20	-	
4	Excavator	1	1	-	

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan*

**d. Sumber Daya SKPD**

Dinas perikanan dan kelautan memiliki sumber daya manusia dengan jumlah personil sebanyak 61 orang, dimana jenjang pendidikan serta kepangkatan masing-masing personil dapat dijelaskan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:



**Tabel 4.4**

**Sumber daya SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan**

**Tahun 2012**

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal
<b>A. Jabatan Struktural</b>					
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2
2.	Sekretaris	1	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2
3.	Kepala Bidang	4	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2
			Pembina IV-a	1	S-2
			Penata Tingkat I/III-d	2	S-2
4.	Ka. Sub. Bagian	3	Penata Tingkat I/III-d	2	S-1
			Penata/ III-c	1	S-1
5.	Kepala Seksi	10	Pembina/IV-a	3	S-2
			Pembina Tingkat I/III-d	1	S-1
			Penata/ III-c	6	S-1
			Penata Muda Tk. I/III-b	1	S-2
6.	Kepala UPT	4	Pembina/IV-a	1	S-2
			Pembina Tingkat I/III-d	1	D-3
			Penata/ III-c	2	S-1
7.	Staf	25	Penata Muda Tk. I/III-b	9	S-1
			Penata Muda/III-a	5	S-1
			Pengatur Tk. I/II-d	1	S-1
			Juru/ I-c	1	S-1
			Pengatur Muda Tk. I/II-b	6	S-1
			Tenaga Kerja Kontrak	3	S-1
<b>B. Jabatan Fungsional</b>					
1.	Penyuluh Perikanan	12	Penata Muda Tk./III-b	4	S-1
			Penata Muda/III-a	8	S-1
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>		<b>61</b>	

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan 2012

**5. Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan suatu proses secara sistematis yang berkelelanjutan dari serangkaian kegiatan yang berupa rencana tindakan yang

mendasar, selama kurun waktu 5 lima tahunan yang menggambarkan visi misi, tujuan dan sasaran, mengenali lingkungan, melakukan beberapa analisis, antisipatif, dan mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana strategis (RESTRA) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kelembagaan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Inpres no. 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau timbul oleh karena itu disetiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan prima dan selanjutnya melalui penyusunan suatu laporan akuntabilitas kinerja akan diketahui keberhasilan atau kegagalan suatu instansi tersebut dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan kepadamasyarakat.

### **Landasan Hukum**

Landasan penyusunan restra dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan tahun 2011-2015 adalah:

1. Landasan idiil : Pancasila

2. Landasan konstitusional : UUD 1945
3. Landasan operasional :
  - a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  - b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - d. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
- q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014.

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015.
- s. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan.
- t. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

## **Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan RESTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 dimaksud untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendukung tugas membantu kepala daerah dalam perumusan kebijaksanaan teknis bidang kelautan dan perikanan meliputi antara lain: pemanfaatan, pengelolaan sumber daya perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disamping itu juga pengolahan data, penyajian informasi di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan tugas ketata usahaan rumah tangga dinas. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **b. Tujuan**

Perencanaan strategis bertujuan sebagai langkah untuk penerapan manajemen strategis yang selanjutnya akan memudahkan penerapan

pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam suatu akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dalam pembangunan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan**

#### **a. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Peran sumber daya manusia sebagaisangat menentukan gerak laju suatu organisasi dalam mendukung pola penentuan strategi dan kebijakan serta mengolah dan mengelola sumber daya alam atau potensi yang ada di daerahnya. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah sumber daya aparatur dan sumber daya nelayan.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Ubaid, MM selaku Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, menyatakan:

“Sumber daya manusia merupakan penggerak jalannya pemerintahan. Sumber daya manusia (pegawai) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan memiliki jumlah yang terbatas dalam artian kurangnya tenaga staf dalam setiap bidang, seperti terbatasnya jumlah tenaga penyuluhan di bidang perikanan kelautan tangkap dan pengolahan hasil perikanan serta budidaya, dan terbatasnya personil secara kualitas. Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh akan berdampak pada pelaksanaan pelayanan dalam bidang pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kegiatan dan perikanan khususnya penyuluhan tidak maksimal. Sedangkan sumber daya nelayan dan petani ikan itu sendiri masih memiliki kualitas yang rendah, ini disebabkan karena tingkat pendidikan hanya pada SD sampai SMA. Rendahnya kualitas nelayan dan petani ikan berdampak pada kurangnya wawasan terhadap pengetahuan teknik penangkapan ikan maupun budidaya, kurangnya wawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan

dan sistem pengelolaan budidaya yang masih bertaraf tradisional sehingga mengacu pada hasil produksi perikanan itu sendiri. (wawancara pada hari senin 27 mei 2013).

Untuk mengetahui jumlah sumber daya tenaga kerja perikanan kabupaten lamongan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**

**Perkembangan Tenaga Kerja Perikanan di Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

Status Tenaga Kerja	Tahun		Perkembangan
	2011	2012	
1. Nelayan Laut	28.154	28.154	0
2. Nelayan Perairan Umum	6.886	6.886	0
3. Pembudidaya	34.357	38.574	4.217
4. Pengolah	688	700	12
5. Hatchery	43	43	0
<b>Jumlah</b>	<b>70.128</b>	<b>74.357</b>	<b>4.229</b>
Tahun 2011	70.128		
Tahun 2010	67.377		

*Sumber: dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan*

Berdasarkan tabel diatas perkembangan tenaga kerja perikanan dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami perkembangan, pada tahun 2011 mengalami perkembangan sebesar 2.641 orang, sedangkan pada tahun 2012 mengalami perkembangan sebesar 4.229 orang, terlihat pada status tenaga kerja pembudidaya ikan dimana mengalami perkembangan sebesar 4.217 orang, kenaikan tersebut disebabkan karena adanya budaya.

## 1. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan sumber daya manusia, bermacam upaya yang telah dilakukan dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, petani ikan, dan nelayan terus dilaksanakan dengan memberikan pendidikan maupun pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai bertujuan untuk menciptakan aparatur yang berpengetahuan, terampil professional serta menguasai bidangnya. Sedangkan pelatihan bagi petani ikan dan nelayan diharapkan dapat merubah sikap dan mental yang lebih baik dan dinamis serta meningkatkan produksi maupun usahanya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

## 2. Penyuluhan

Upaya pengembangan yang dilakukan dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan adalah kegiatan penyuluhan. Tugas penyuluhan di lapangan di lakukan oleh seksi penyuluhan dibantu oleh petugas teknis lapangan (PTL) dan pengawas perikanan yang berada di tiap-tiap kecamatan. Beberapa kegiatan yang mendukung pada tugas penyuluhan adalah:

### a. Promosi Hasil Pembangunan Perikanan

Dalam promosi hasil pembangunan perikanan kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan teknik pengolahan produk perikanan dan promosi hasil perikanan yang pelaksanaannya ditujukan kepada ibu-ibu PKK desa. Kegiatan yang dimaksud meliputi peragaan pengolahan ikan seperti pembuatan surimi, bakso ikan, nugget, abon, dan sosis ikan. Dengan target kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat.
2. Penganekaragaman hasil olahan perikanan.
3. Peningkatan konsumsi ikan.
4. Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan lainnya dapat berupa penyuluhan budaya kelautan. Kegiatan direalisasikan dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi, penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan, gerakan kebersihan laut dan pantai beserta sekitarnya, dan pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebersihan. Dengan harapan adanya pembinaan lanjutan kepada masyarakat nelayan / pesisir sehingga masyarakat nelayan / pesisir tahu dan slalu menjaga kebersihan laut dan pantai.

b. Pembinaan Nelayan / Petani Ikan

Pelaksanaan pembinaan nelayan / petani ikan dilakukan dengan kegiatan pertemuan kelompok pada waktu yang telah dijadwalkan secara berkala. Dalam pembinaan ini, nelayan / petani ikan diharapkan dapat memberikan inovasi teknologi terhadap perkembangan ilmu perikanan saat ini. Sehingga dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan pembangunan dalm sektor perikanan dan kelautan. Penyuluhan tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan upaya pembinaan kepada kelompok nelayan dan petani ikan dengan sistem latihan dan kunjungan.

Penyuluhan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja perikanan sangat diperlukan guna meningkatkan hasil produksi perikanan. Menurut Bapak H. Ali Fauzi, SH, selaku nelayan di Paciran, menyatakan:

“Pengadaan penyuluhan monitong mengenai kualitas air dan penyakit ikan, memberikan manfaat terhadap pembudidayaan kami. Dalam penyuluhan tersebut dijelaskan tentang faktor utama kualitas air, yang mana kualitas air tidak hanya menentukan seberapa baik ikan bertumbuh dalam sistem budidaya, tapi apakah mereka mampu bertahan hidup. Kualitas air akan mempengaruhi proses seperti respirasi dan metabolisme nitrogen. Pergantian air merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kecepatan arus air. (wawancara pada hari selasa 23 juli 2013).

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan monitoring kualitas air dan penyakit ikan, sangat mempengaruhi kualitas hasil panen. Dimana manajemen kualitas air berpengaruh terhadap pertumbuhan, jika kualitas air terkontrol pathogen sulit berkembang di perairan tersebut. Berikut ini kegiatan dan pelatihan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan kabupaten lamongan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

**Kegiatan Dan Pelatihan Keterampilan Nelayan dan Pembudidaya Ikan  
Kabupaten Lamongan**

NO.	Peserta	Tema /jenis diklat /kegiatan
1.	Kelompok tani nelayan se-kab Lamongan	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Nelayan Berpenghasilan rendah
2.	Kelompok tani nelayan se-kab Lamongan	Pembinaan KUB perikanan tangkap
3.	Kelompok tani nelayan se-kab Lamongan	Pengadaan dan pembinaan alat tangkap perikanan (BUBU)
4.	Kelompok tani Budidaya se-kab Lamongan	Pengadaan dan pelatihan Teknologi budidaya perikanan
5.	Kelompok tani Budidaya se-kab Lamongan	Monitoring kualitas air dan penyakit ikan
6.	Kelompok tani nelayan se-kab Lamongan	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2012*

Berdasarkan tabel diatas kegiatan pelatihan dan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan berdasarkan tema diklat, pendampingan bantuan stimulant pembangunan rumah nelayan berpenghasilan rendah yang ditujukan pada kelompok tani nelayan, pembinaan KUB perikanan tangkap yang ditujukan pada kelompok tani nelayan, pengadaan dan pembinaan alat tangkap perikanan ditujukan pada kelompok tani nelayan, pengadaan dan pelatihan teknologi budidaya perikanan ditujukan pada kelompok tani budidaya, monitoring kualitas air dan penyakit ikan ditujukan pada kelompok tani budidaya, dan pembentukan kelompok swakarsa sumber daya kelautan ditujukan pada nelayan.

Keberadaan sumber daya aparatur sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi. Dalam Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, kualitas kinerja pegawai merupakan faktor penting sebagai penggerak dinas perikanan dan kelautan, khususnya tenaga penyuluh perikanan. Menurut Bapak Dwi Santoso, S.Pd, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Bapak Dwi Santoso, S.Pd, yang telah mengikuti Diklat PIM menyatakan:

“Pelajaran yang diambil dari Diklat PIM adalah upaya mempersiapkan tenaga-tenaga yang mempunyai kepribadian dan profesionalisme dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap melaksanakan tugas jabatan secara professional sesuai dengan etika. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.(wawancara pada hari selasa 23 juli 2013)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai sangat diperlukan dengan upaya meningkatkan kualitas pegawai yang mempunyai kepribadian dan profesionalisme dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut pegawai memiliki sikap yang baik sesuai dengan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas kinerja sumber daya aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

**Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

No.	Tema Pendidikan dan Pelatihan	Tempat Pelatihan
1.	Diklat PIM	Sanggar Pramuka Kabupaten Lamongan
2.	Pelayanan Prima kepada masyarakat	Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan*

Berdasarkan tabel diatas, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan kabupaten lamongan pada tahun 2012 yaitu diklat PIM, dan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Dimana manfaat dari diklat PIM adalah membentuk sikap dan keterampilan pegawai berdasarkan dengan etika yang ada. Sedangkan pendidikan dan pelatihan mengenai pelayanan prima kepada masyarakat adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

**b. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan kegiatan perikanan yang meliputi segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama ataupun pembantu dalam pekerjaan dibidang perikanan. Menurut bapak Imam Khudori, ST selaku Kasi Prasarana dan penangkapan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, menyatakan:

“Teknologi yang digunakan dalam sektor perikanan tangkap meliputi GPS, fish finder dan cool box. Fungsi GPS digunakan untuk mencari dan mengetahui tempat dimana ikan berkumpul. Sedangkan cool box berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang digunakan pascapanen supaya ikan lebih awet, apalagi untuk pemasaran keluar kota. Sedangkan pada perikanan budidaya, teknologi yang digunakan antara lain, penerapan biosecurity, yang mana penerapan biosecurity pada kolam budidaya dapat mencegah pathogen atau virus dari luar masuk ke lahan budidaya sehingga komoditi yang dibudidayakan akan lebih terjamin baik dari proses manajemen budidaya dan hasil panen.(wawancara pada hari senin 27 mei 2013)”.

Penjabaran yang telah dijabarkan oleh bapak Imam Khudori, ST diperkuat dengan pendapat Bapak Efendi Adisan selaku nelayan kecamatan brondong, menyatakan:

“Cold box merupakan kebutuhan penting bagi kami nelayan dan petani ikan, dimana saat hasil tangkapan melimpah keberadaan cold box sangat dibutuhkan untuk penyimpanan ikan agar bisa tahan lama dan untuk pemasaran ke luar kota. Sebelum pengadaan cold box, penyimpanan ikan menggunakan es balok, penggunaan es balok ini memakan biaya produksi yang sangat tinggi. Pengadaan GPS dan fish finder mempermudah para nelayan dalam mencari keberadaan gerombolan ikan dengan menghemat waktu, tenaga, dan bahan bakar.” (Wawancara pada hari selasa 23 juli 2013)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan teknologi perikanan sangat dibutuhkan oleh para nelayan dalam meningkatkan hasil produksi perikanan. GPS dan fish finder dapat membantu nelayan dalam mencari keberadaan gerombolan ikan yang akan ditangkap. Sedangkan keberadaan sangat penting dimana fungsi cold storage itu sendiri merupakan tempat penyimpanan ikan pascapanen yang pada hari itu tidak terjual dan yang akan dikirimkan keluar kota.

### **1. Alat tangkap yang digunakan**

Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dilakukan dengan cara penangkapan sumber daya ikan yang ada secara bertanggung jawab dan

berkesinambungan. Dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan kabupaten lamongan. Keberadaan kapal dan perahu nelayan merupakan salah satu faktor yang penting. Terlebih lagi untuk meningkatkan produksi sektor perikanan dan kelautan. Perahu dan alat tangkap nelayan merupakan sarana, sedangkan nelayan adalah pengelolanya. Sedangkan sebagai penunjang pemanfaatan sumber daya ikan yang dioperasikan. Adapun perkembangan armada dan alat penangkapan ikan dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:



Tabel 4.8

## Perkembangan Jumlah Armada perikanan

No.	Jenis	Jumlah Armada (Unit)		
		2010	2011	2012
1.	<b>Tanpa perahu</b>			
2.	<b>Perahu Tanpa Motor</b>			
	Jukung			
	Perahu Papan			
	– Kecil			
	– Sedang			
	– Besar			
3.	<b>Motor Tempel</b>			
	0 - 5 PK	713	713	713
	5 - 10 PK	1,695	1,695	1,695
	10 - 20 PK			
	20 - 30 PK			
	> 30 PK			
4.	<b>Kapal Motor</b>			
	0 - 5 PK			
	5 - 10 PK	2,422	2,422	2,422
	10 - 20 PK	1,592	1,592	1,952
	20 - 30 PK	1,104	1,105	1,105
	> 30 PK			
	<b>Jumlah</b>	<b>7,526</b>	<b>7,527</b>	<b>7,527</b>

Sumber: dinas perikanan dan kelautan kab. Lamongan

Berdasarkan tabel 4.8, jumlah armada perikanan pada tahun 2012 sejumlah 7,527 unit, pada motor tempel 0-5 PK sejumlah 713 unit, 5-10 PK sejumlah 1,695 unit. Sedangkan pada kapal motor 5-10 PK sejumlah 2,422 unit, 10-20 PK sejumlah 1,952 unit, dan 20-30 PK sejumlah 1,105 unit.

Perkembangan armada perikanan pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami kenaikan 1 unit armada pada kapal motor 20-30 PK. Selain armada perikanan diperlukan juga alat tangkap untuk menunjang hasil produksi perikanan. Adapun jumlah alat tangkap yang digunakan pada tahun 2012, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Alat Tangkap Tahun 2012**

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat Tangkap (Unit)
1.	Purse Seine	274
2.	Payang Besar	846
3.	Rawai	521
4.	Dogol	2,453
5.	Gill Net	1,071
6.	Tramel Net	300
7.	Bubu	2,991

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan*

Berdasarkan tabel 4.9, alat tangkap yang digunakan tahun 2012, meliputi purse seine sejumlah 274 unit, purse seine merupakan alat tangkap yang sangat efektif dalam menghasilkan ikan-ikan pelagis karena bisa menghasilkan berbagai macam jenis ikan, payang besar sejumlah 846 unit, rawai sejumlah 521 unit, dogo sejumlah 2,453 unit, gill net 1,071 unit, trammel net 300 unit, dan bubu 2,991 unit. Alat tangkap yang banyak digunakan adalah alat tangkap bubu yang berupa jebakan.

Terkait dengan perkembangan armada penangkapan diatas, menurut Bapak Imam Khudori, ST selaku Kasi Prasarana dan Penangkapan, menyatakan:

“Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah armada penangkapan pada kapal motor 20-30 PK walaupun hanya satu unit, sedangkan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 tidak mengalami peningkatan jumlah armada penangkapan. Mayoritas armada penangkapan ikan merupakan milik pribadi nelayan. Peningkatan jumlah armada ikan mengalami peningkatan tergantung pada musim. Karena kondisi musim sangat mempengaruhi aktivitas penangkapan perikanan di laut lepas yang benar-benar sangat diperhatikan oleh nelayan. Adapun program dari pemerintah mengenai pengadaan kapal sebesar 600 unit, tetapi pembagian kapal tersebut tidak bias dijadikan sebagai acuan karena masih harus dibagi ratakan ke daerah diseluruh Indonesia. Diharapkan dari pemerintah kabupaten lamongan bersama para nelayan dapat membangun kapal sendiri.(wawancara pada hari senin 27 mei 2013)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas armada penangkapan perikanan mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah armada bergantung pada kondisi musim, dimana kondisi musim sangat mempengaruhi aktivitas penangkapan di laut lepas. Keberadaan armada perikanan merupakan hal terpenting dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan. Nelayan diharapkan mampu membangun kapal sendiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah.

## **2. Balai Benih Ikan (BBI)**

Balai Benih Ikan (BBI) Kalen dan Karanggeneng merupakan BBI yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan. Sarana dan prasarana BBI cukup lengkap berupa kantor; gedung serba guna; mess karyawan; gedung dan peralatan lainnya, Keberadaan BBI tersebut punya peranan penting dalam usaha perikanan Lamongan yaitu:

- Penyedia benih ikan bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan.
- Tempat pemuliaan induk-induk unggul

Berikut ini Balai Benih Ikan Kabupaten Lamongan dan benih ikan yang dibudidayakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**

**Balai Benih Ikan Kalen, Kecamatan Kedungpring**

No	Keterangan	Volume	Satuan
1.	<b>Luas Keseluruhan BBI</b>	2,00	Ha
2.	<b>Luas Kolam</b>		
	Kotor	1,50	Ha
	Bersih	1,00	Ha
3.	<b>Produksi Benih</b>		
	1. Tawes	201.400	Ekor
	2. Mas	165.220	Ekor
	3. Nila	251.810	Ekor
	4. Lele	89.350	Ekor
	5. Patin	5.875	Ekor

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2012

**Tabel 4.11**

**Balai Benih Ikan Karanggeneng, Desa Sumberwudi  
kecamatan Karanggeneng**

No	Keterangan	Volume	Satuan
1.	<b>Luas Keseluruhan BBI</b>	0,50	Ha
2.	<b>Luas Kolam</b>		
	Kotor	0,40	Ha
	Bersih	0,36	Ha
3.	<b>Produksi Benih</b>		
	1. Mas	15.650	Ekor
	2. Nila	72.600	Ekor
	3. Lele	40.520	Ekor

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, Balai benih ikan merupakan sarana yang diberikan oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan sebagai penyedia benih ikan bermutu dengan kualitas yang unggul dalam memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan. Adapun produksi benih yang dikembangkan oleh balai benih ikan pada kecamatan kedungpring adalah ikan tawes sebesar 201.400 ekor, mas sebesar 165.220 ekor, nila sebesar 251.810 ekor, lele sebesar 89.350 ekor, dan patin sebesar 5.875 ekor. Sedangkan produksi benih yang disediakan oleh balai benih ikan kecamatan karanggeneng adalah ikan mas sebesar 15.650 ekor, nila sebesar 72.600 ekor, dan lele sebesar 40.520 ekor.

### **3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**

Pengolahan merupakan kegiatan mengolah hasil produksi perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual hasil perikanan. Sedangkan pemasaran merupakan kegiatan untuk mendistribusikan hasil produksi untuk mempertahankan usaha perikanan. Menurut Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Arif Soedjanarta, menyatakan:

“Meningat bahwa lamongan dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, masyarakat nelayan diminta memberi nilai tambah pada ikan melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Kimbis) di Desa Weru Komplek, Kecamatan Paciran. Selama ini Desa Weru dikenal sebagai salah satu sentra industri pengolahan produk perikanan skala rumah tangga. Selama ini masyarakat Desa Weru sudah banyak menghasilkan produk olahan dari ikan laut. Namun produk-produk itu masih berkualitas rendah karena menggunakan bahan baku yang kurang baik, proses produksi yang masih sederhana dan kurang higienis. Pasarnya masih terbatas lokal saja dan tanpa memiliki branding merek yang jelas. Keberadaan Kimbis menjadi sangat penting untuk nelayan. Lembaga bentukan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan itu hanya ada 11 di Indonesia, satu diantaranya di Lamongan sebagai daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap dan budidaya. Kimbis

akan memberikan pelatihan produk berkualitas dan higienis, seperti pembuatan produk hasil perikanan berupa abon ikan, otak-otak, krupuk ikan, tik-tik ikan dan krispi ikan. Kimbis akan memberikan fasilitas pengurusan sertifikasi izin pangan industri rumah tangga untuk meningkatkan daya saing produk. Masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan bisnis kelompok agar bisa lebih komersial. Untuk pemasaran ikan laut akan di lelang dibawa bakul dan dipasarkan di daerah setempat. (wawancara pada hari Selasa 28 Mei 2013)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pengolahan produk perikanan masih memiliki kualitas rendah, dengan menggunakan bahan baku yang kurang baik serta proses produksi sederhana dan kurang higienis. Kabupaten Lamongan memiliki KIMBIS (Klinik Iptek Mina bisnis), kimbis merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah yang memberikan pelatihan produk kualitas dan higienis, serta memberikan fasilitas pengurusan sertifikasi izin pangan industri rumah tangga untuk meningkatkan daya saing produk. Pengolahan hasil perikanan berdasarkan usaha perikanan menurut jenis industri dan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.12

**Pengolahan Usaha Perikanan Menurut Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan Tahun 2012**

Jenis Industri	Jumlah tenaga kerja	Volume (Kg)
<b>Industri Pengolahan</b>		
Pengeringan	146	4.950.308
Pemindangan	93	5.487.000
Pendinginan Es-esan	206	30.900.000
Terasi	52	20.800
Petis	40	7.600
Pengasapan	81	779.959
Tepung Ikan	20	2.948.288
Krupuk	7	723.320
Cold Storage/ Surimi	41	28.750.000
Bakso Ikan/Nugget/Abon	21	689.500
<b>Kab. Lamongan</b>	<b>700</b>	<b>75.256.775</b>

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan*

Berdasarkan tabel 4.12, pengolahan hasil perikanan kabupaten lamongan Hasil dari produksi perikanan tangkap dan budidaya, selain di lelang dilakukan pengolahan produksi perikanan dengan industri pengolahan pengeringan yang dilakukan di desa Lohgung dengan jumlah tenaga kerja 146 orang dan hasil produksi perikanan yang digunakan sebesar 4.950.208 kg. Pemindangan dilakukan di kecamatan Brondong dengan jumlah tenaga kerja 93 orang dan hasil produksi yang digunakan sebesar 5.487.000 kg. Pendinginan dengan jumlah tenaga kerja 206 orang dan hasil produksi yang digunakan sebesar 30.900.000 kg. Pembuatan trasi dengan jumlah tenaga kerja 52 orang dan hasil produksi yang digunakan sebesar 20.800 kg. Pembuatan petis dengan jumlah

tenaga kerja 40 orang dan jumlah produksi yang digunakan 7.600 kg. Pengasapan dengan jumlah tenaga kerja 81 orang dan jumlah produksi yang digunakan 799.959 kg. Tepung ikan dengan jumlah tenaga kerja 20 orang dan produksi perikanan yang digunakan sebesar 2.948.288 kg. Pembuatan kerupuk ikan dilakukan di desa sendangagung dengan jumlah tenaga kerja 7 orang dan produksi perikanan yang digunakan sebesar 723.320 kg. Pembuatan Cold storage/ surimi dilakukan di beberapa tempat antara lain desa brengok, brondong, kemantren dan sidokelar dengan jumlah tenaga kerja 41 orang dan jumlah produksi yang digunakan sebesar 28.750.000 kg. pembuatan bakso ikan, nugget, dan abon dengan jumlah tenaga kerja 21 orang dan produksi perikanan sebesar 689.500 kg.

### **c. Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

#### **Kelautan**

##### **1. SumberDaya Perikanan**

Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan cukup besar yang meliputi bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan serta di dukung oleh Bidang Pengawasan dan kegiatan lainnya. Kabupaten Lamongan pada sektor perikanan tangkap memiliki panjang pantai kurang lebih 47 km dengan lebar 4 mill laut dengan armada tangkap 7527 unit ,alat tangkap sebanyak 8456 unit dan didukung 5 tempat pelelangan ikan (TPI).

Produksi perikanan tangkap tahun 2012 adalah 69.216,00 ton dengan nilai produksi 806,382 milyar dan jumlah nelayan sebanyak 28154 orang, selain usaha penangkapan ikan di laut usaha penangkapan juga di lakukan di perairan umum berupa rawa-rawa dan waduk seluas 10.155,00 hektar dan sungai sepanjang 855,50 km yang diusahakan oleh 6886 RTP dengan produksi 2.996,8 ton dengan nilai sebesar 28,576 milyar. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2012 sebesar 37.245,17 ton dengan nilai sebesar 674,922 milyar yang diusahakan oleh 25,284 orang. Pada sub sektor perikanan Budidaya, kegiatan diusahakan pada areal sekitar 23,454.73 hektar, meliputi tambak seluas 1.745.40 hektar, sawah tambak 23.454.73 hektar dan kolam seluas 341.66 hektar.

#### **a) Perikanan Tangkap**

Dengan adanya wilayah utara kabupaten lamongan yang berbatasan dengan perairan laut jawa, maka areal perikanan kabupaten lamongan cukup besar dengan panjang pantai 47 km, ditandai dengan hasil tangkapan nelayan sebanyak 69.216,00ton pada tahun 2012. Usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut jawa pada wilayah kecamatan Brondong dan Paciran yang memiliki 5 pusat pendaratan ikan (PPI) sekaligus tempat pelelangan ikan (TPI) yaitu mulai arah barat ke timur (Lohgung yang berbatasan langsung dengan Tuban, Labuhan, Brondong, Kranji dan Weru yang berbatasan dengan kabupaten Gresik. Disamping TPI Kabupaten, Lamongan sejak tahun 1987 juga berdiri Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) yaitu dikenal dengan nama Pelabuhan Nusantara produksi perikanan sector laut menurut PPI dan nilai produksi kabupaten lamongan tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13

## Produksi Perikanan Sektor Laut

Menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan dan Nilai Produksi di Kabupaten

Lamongan Tahun 2012

PPI	Produksi (Ton)
1. Lohgung	496,50
2. Labuhan	674,50
3. Brondong/ Blimbing	60.614,90
4. Kranji	3.475,80
5. Weru	3.954,30
<b>Jumlah</b>	<b>69.216,00</b>
Tahun 2011	68.302,08
Tahun 2010	61.431,5

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel 4.13, Produksi perikanan tangkap berdasarkan pelabuhan pelelangan ikan mengalami peningkatan/ perkembangan dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 hasil produksi perikanan tangkap sebesar 61.431,5 ton per tahun dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 6.871 ton sebesar 68.302,08 ton pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 69.216,00 ton. Berikut ini merupakan data dari rekapitulasi produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum per kwartal dengan produksi perikanan tangkap laut sebesar 69216 ton, dan produksi perairan umum sebesar 2996,8 ton.

#### b) Perikanan Budidaya

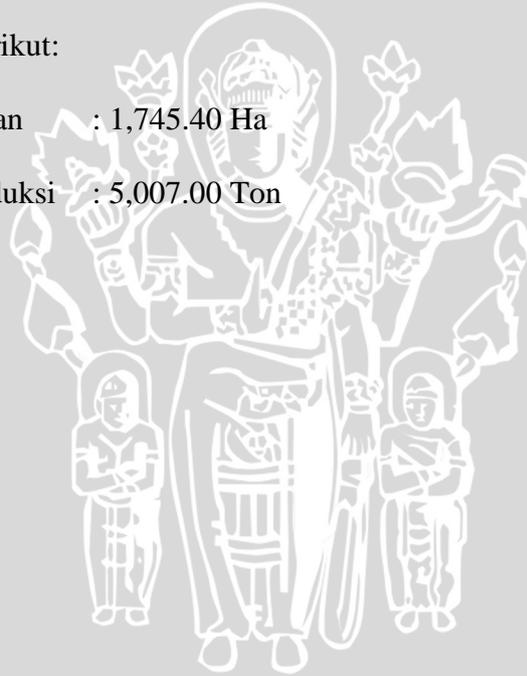
Potensi perikanan di kabupaten lamongan terkonsentrasi pada budidaya di tambak, sawah tambak, kolam dan sungai.

## 1. Budidaya Air Payau (Tambak)

Perikanan budidaya dikembangkan pada budidaya air payau. Budidaya air payau tersebar di sepanjang pantai utara kabupaten lamongan seperti kecamatan paciran, brondong, dan glagah dengan komoditas yang dikembangkan meliputi udang vannamei, udang windu, bandeng dan kerapu. Khusus budidaya udang vannamei merupakan pencaangan program revitalisasi budidaya perikanan untuk menumbuh kembangkan produksi udang sebagai komoditas ekspor. Hasil produksi perikanan budidaya air payau (tambak), dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Potensi Lahan : 1,745.40 Ha

Potensi produksi : 5,007.00 Ton



## b. Produksi

Tabel 4.14

**Jenis Ikan Budidaya Air Payau (Tambak) di Kabupaten Lamongan  
Tahun 2012**

No.	Jenis ikan	Volume (Ton)
1.	Kerapu	251.391
2.	Mujair	137.154
3.	Bandeng	612.50
4.	Nila	236.618
5.	Ikan Lain	103.65
6.	Udang Windu	4,72
7.	Udang Vaname	2,442.679
8.	Udang Lain	29.402
9.	Kepiting	0,467
	Jumlah	3,818.58

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2012*

Berdasarkan tabel 4.14, Budidaya air payau atau biasa yang dikenal sebagai tambak, di wilayah lamongan dikembangkan pada kecamatan paciran, brondong, dan glagah dengan komoditas seperti ikan kerapu dengan jumlah produksi mencapai 251.391 ton per tahun, ikan mujair dengan jumlah produksi mencapai 137.154 ton, ikan bandeng dengan jumlah produksi mencapai 612.5 ton, ikan nila mencapai 236.618 ton, ikan lain 103,65 ton, udang windu 4,72 ton, ikan vanname 2,442.679 ton, udang lain 29.402 ton, dan kepiting dengan jumlah produksi 0,476 ton. Dimana jumlah produksi perikanan yang paling besar adalah udang vanname mencapai 2,442.679 ton per tahun. Dari hasil produksi pada tabel diatas, tidak lepas dengan peran penting dari tenaga

pembudidaya sebagai faktor penggerak pembudidayaan produksi perikanan yang berfungsi sebagai pengoordinasian dan pengelolaan yang berkaitan dengan budidaya tersebut. Berikut merupakan jumlah petani mina padi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.15**

**Jumlah Petani Ikan Budidaya Air Payau**

No.	Kategori	Jumlah
1.	Pemilik	2,282 Orang
2.	Pendega	1,711 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3,993 Orang</b>

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2012*

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, jumlah petani perikanan budidaya air tawar sebanyak 3,993 orang. Yang meliputi petani pemilik lahan sebanyak 2,282 orang, dan sisanya sejumlah 1,711 orang merupakan pendega.

**2. Budidaya Air Tawar (Mina Padi)**

Perikanan budidaya juga dikembangkan budidaya air tawar, perikanan budidaya air tawar tersebar di kecamatan turi, karanggeneng, dekat, kedungpring, dan kalitengah. Adapun komoditas yang dibudidayakan dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Potensi lahan : 3,540.00 Ha
- Potensi Produksi : 1,200.00 Ton

## b. Produksi

Tabel 4.16

## Jenis Ikan Budidaya Air Tawar (Mina Padi) di Kabupaten Lamongan

Tahun 2012

No.	Jenis ikan	Volume (Ton)
1.	Mas	39,18
2.	Mujair	94,70
3.	Nila	128,56
4.	Gabus	21,31
5.	Ikan Lain	12,17
6.	Udang Vaname	79,86
7.	Udang Lain	12,03
	Jumlah	387,79

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2012

Berdasarkan tabel 4.16, Budidaya air tawar mina padi yang biasa disebut dengan sawah tambak. Pola budidaya yang digunakan disawah tambak disesuaikan dengan kondisi bonorowo yaitu: pola ikan-kan-ikan, pola ikan-ikan-padi, dan pola padi-ikan-padi. Komoditas yang dikembangkan adalah ikan mas dengan jumlah produksi 39.18 ton, ikan mujair 94.70 ton, ikan nila 128,6 ton, ikan gabus 21,31 ton, ikan lain 12,17 ton, udang vanname 79,86 ton, udang lain 12,03 ton. Dari hasil produksi pada tabel diatas, tidak lepas dengan peran penting dari tenaga pembudidaya sebagai faktor penggerak pembudidayaan produksi perikanan yang berfungsi sebagai pengoordinasian dan pengelolaan yang berkaitan dengan budidaya tersebut. Berikut merupakan jumlah petani mina padi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.17

## Jumlah Petani ikan Budidaya Air Tawar

No.	Kategori	Jumlah
1.	Pemilik	3,966 Orang
2.	Pendega	991 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>4957 Orang</b>

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2012

Berdasarkan tabel 4.17, jumlah petani perikanan budidaya air tawar sebanyak 4957 orang. Yang meliputi petani pemilik lahan sebanyak 3,966 orang, dan sisanya sejumlah 991 orang merupakan pendega.

### c. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam rakyat (PUGAR) difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi petambak garam, pengasapan dan pengolah dalam mendukung swasembada garam. Kegiatan PUGAR tahun 2011 yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan sejumlah 19 kelompok dalam satu Kecamatan yang terdiri dari 5 Desa (Sedayulawas, Sidomukti, Brengkok, Labuhan dan Lohgung). Sedangkan tahun 2012 terdapat dua Kecamatan (Paciran dan Brondong) dengan 6 Desa (Sedayulawas, Sidomukti, Brengkok, Labuhan, Lohgung dan Tunggul).

Kegiatan PUGAR dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) dilaksanakan melalui prinsip bottom-up, artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

## 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kabupaten

### Lamongan

Pengembangan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dibuat beberapa program guna menjalankan strategi yang diterapkan. Menurut Bapak Drs. Abdullah Ubaid, MM selaku Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, menyatakan:

“Dilihat dari sudut sumber daya perikanan kabupaten lamongan mempunyai potensi yang cukup besar selain wilayahnya yang berbatasan langsung dengan laut jawa. Usaha penangkapan ikan laut di Kabupaten Lamongan terpusat di perairan Laut Jawapada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 (lima) Tempat Pendaratan Ikan (TPI), yaitu mulai dari arah timur ke barat (Weru, Kranji, Brondong, Labuhan Lohgung). Lamongan juga sangat cocok dikembangkan budidaya air payau (tambak). Dengan adanya sumberdaya perikanan yang ada tersebut diharapkan mampu mensejahterakan petani (nelayan) dan menjadi tumpuan perekonomian dalam pembangunan kabupaten lamongan itu sendiri (wawancara pada hari senin tanggal 27 mei 2013).

Penyajian data berdasarkan hasil dokumentasi mengenai visi misi Kabupaten Lamongan:

Visi Kabupaten Lamongan adalah mewujudkan masyarakat lamongan yang sejahtera, berkeadilan, beretika, dan berdaya saing.

Misi Kabupaten Lamongan:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat: serta menjamin kesediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas);
2. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumberdaya alam;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), menuju pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);

4. Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya local, dan kesetaraan gender.

Berdasarkan hasil dokumentasi mengenai fungsi pada dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan:

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan:

Visi: “Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Produktivitas, Sektor-Sektor Andalan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam”

Makna dari visi tersebut adalah keadaan masyarakat kabupaten lamongan lamongan bekerja sebagai pemelihara ikan, penangkap ikan yang mampu bertahan dalam berbagai perubahan dan berupaya merubah dari kegiatan yang bersifat tradisional menuju berwawasan industri dan berjiwa bisnis dengan mengutamakan potensi yang ada di daerah.

Adapun tujuan penetapan visi tersebut adalah :

1. Mencerminkan keinginan yang akan di capai;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
3. Memilih orientasi terhadap masa depan;
4. Memberdayakan potensi yang tersedia;
5. Arah pengelolaan yang produktif dan lestari.

Misi:

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu di rumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya.

Adapun misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
2. Mengembangkan sarana prasarana, teknologi dan informasi perikanan dan kelautan.
3. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan yang tangguh, dan berdaya saing.
4. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja.

Kedudukan dan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam melakukan urusan pemerintahan, Dinas perikanan dan

kelautan kabupaten lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan.

Berikut ini merupakan penyajian data berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, Bapak Ir. Suyatmoko, MMA :

“Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang mana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang telah ada, sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan memiliki kewajiban membantu pemerintah daerah dalam pembangunan kabupaten lamongan. Berdasarkan potensi yang dimiliki kabupaten lamongan yaitu wilayah yang berbatasan langsung dengan laut jawa dengan potensi perikanan yang cukup besar, maka dinas perikanan dan kelautan memiliki tugas untuk mengelola potensi perikanan dan kelautan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan harapan masyarakat yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan ke arah yang lebih maju dengan meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan melalui optimalisasi usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum serta ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap budidaya ikan di tambak, sawah tambak, dan kolam pekarangan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta terwujudnya peningkatan konsumsi ikan di masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera (wawancara pada hari selasa tanggal 28 mei 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kabupaten lamongan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, dengan adanya sumber daya perikanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Sektor perikanan dan kelautan memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian daerah. Dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan selaku instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dan mengelola sumber daya tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi

masyarakat kabupaten lamongan. dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya perikanan, dinas perikanan dan kelautan membuat rencana strategis. Rencana strategis yang ingin diterapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yaitu: “Meningkatkan, dan mengembangkan dan memberdayakan usaha penangkapan ikan dilaut, perairan umum serta usaha budidaya di sawah tambak, tambak, kolam, dan konsumsi ikan di masyarakat serta pengendalian dan pengawasan peralatan penangkap ikan. Dengan tujuan pembangunan perikanan dan kelautan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penangkapan ikan di laut dan perairan umum yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
2. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana produksi.
3. Peningkatan usaha pengolahan ikan, distribusi pemasaran hasil perikanan menuju peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan.

Dengan sasaran:

- a. Penurunan jumlah kapal penangkap ikan yang tidak berizin;
- b. Peningkatan produksi perikanan budidaya,
- c. Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum,
- d. Pembudidaya ikan dan nelayan,
- e. Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat,

Dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, disusun program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dengan kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir pemberdayaan (wanita pesisir) dan perbaikan/ peningkatan jalan pesisir,
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dengan kegiatan pembentukan masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan seperti:
  - a. Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan,
  - b. Pengawasan/operasi penggunaan bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminasi bagi produk perikanan,
  - c. Pembangunan kantor pokmaswas, pengelolaan dan peningkatan kawasan konservasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun,
  - d. Perencanaan zonasi, perencanaan pengelolaan dan aksi.
- c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut dengan kegiatan penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumber daya laut.
- d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut, dengan kegiatan kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut seperti pembangunan tangkis penahan abrasi di daerah pesisir.

e. Program pengembangan budidaya perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan bibit ikan unggul,
2. Pendampingan pada kelompok tani dan pembudidaya ikan seperti memfasilitasi pmi sawah tambak dan monitoring kualitas air dan penyakit ikan,
3. Pembinaan dan pengembangan perikanan yang meliputi:
  - Pelatihan dan pembinaan bagi pembudidaya ikan,
  - Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya
  - Pengadaan peralatan dan bahan-bahan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
  - Rehabilitasi/ perawatan BBI

f. Program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap seperti pembinaan KUB perikanan tangkap
- b. Pembangunan Pemeliharaan rutin dan berkala Tempat Pelelangan Ikan (TPI),
- c. Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan,
- d. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap,
- e. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan tangkap,
- f. Pengadaan sarana dan prasaranan penangkapan ikan.

- g. Program pengembangan sistem penyuluhan dengan kegiatan seperti pembinaan dan penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan, dan pengadaan sarana dan prasarana peralatan penyuluhan.
- h. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pengadaan sarana dan prasarana distribusi ikan,
  2. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan,
  3. Peningkatan mutu dan higienitas hasil perikanan,
  4. Sosialisasi dan promosi gerakan gemar ikan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan**

Faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang dihadapi oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan. Menurut bapak Ir. Suyatmoko, MMA selaku kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan menyatakan:

“Berdasarkan tugas dan fungsinya, dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya jumlah personil dalam setiap bidang, khususnya bidang penyuluhan, dalam bidang pemasaran dan pengolahan hasil produksi perikanan. Sedangkan dalam mewujudkan pembangunan perikanan berdasarkan visi-misi mengalami beberapa hambatan seperti, adanya degradasi lingkungan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya pendidikan dan pengetahuan nelayan, dan mekanisme pasar”.

“Sedangkan dalam melaksanakannya, dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan memiliki pendukung seperti wilayah yang berbatasan

langsung dengan laut jawa dan memiliki potensi produksi perikanan sebesar 60000 ton/ tahun, adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, adanya kebijakan otonomi daerah, adanya kerjasama antar instansi, tersedianya sarana dan prasarana, adanya sistem pengendalian dan pengawasan (wawancara pada hari selasa tanggal 28 mei 2013)”.

### **C. Analisis Data Fokus Penelitian**

#### **1. Strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dalam pembangunan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan**

##### **a. Pengembangan sumber daya manusia**

Otonomi daerah yang diterapkan di seluruh daerah di indonesia menyebabkan setiap daerah di indonesia harus mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kemandirian dan memajukan daerahnya masing-masing. Menurut undang-undang otonomi daerah No. 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana peran sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam menjalankan urusan pemerintahan, agar dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan maksimal maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang memadai.

Kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan perikanan diantaranya adalah sumber daya aparatur / pegawai dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan dan sumber daya nelayan atau petani ikan. Kualitas sumber daya aparatur sebagai penggerak dinas perikanan dan kelautan

harus memadai dimana memiliki jumlah yang cukup untuk menjalankan urusan pemerintahan serta memiliki kompetensi sesuai pada bidangnya, dengan harapan agar memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta agar tidak terjadi adanya perangkapan tugas, khususnya pada bidang penyuluhan. Sumber daya nelayan memiliki peran penting dalam mengelola potensi perikanan yang juga perlu ditingkatkan kualitasnya, agar mampu meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan mengelola hasil laut yang didapat secara optimal.

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, dimana pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat yang sebagian besar masih tidak memiliki wawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan sistem pengelolaan budidaya yang masih bertaraf tradisional sehingga mengacu pada hasil produksi perikanan itu sendiri dengan memberikan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Korten (1984) dalam Suryono (2006:12-25), tentang paradigma pembangunan. Salah satunya mengenai pembangunan yang berpusat pada manusia, atau disebut juga dengan pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Dengan memberikan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dapat meningkatkan kapasitas manusia, dalam hal meningkatkan kapasitas nelayan, petani ikan dan kapasitas pegawai dinas perikanan dan kelautan agar menjadi lebih baik. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan agar mereka dapat

menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor perikanan dan kelautan.

## **b. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

### **1. Alat tangkap yang digunakan**

Friedman (1992) dalam suryono (2004:15-25), mengemukakan tentang konsep pemberdayaan, yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi nelayan atau petani. Kapal dan alat tangkap adalah milik pribadi petani atau nelayan. Berdasarkan paradigma pembangunan tersebut diharapkan masyarakat nelayan dan petani ikan bisa mandiri. Dengan berlandaskan sumber daya pribadi menghasilkan atau membuat kapal dan alat tangkap sendiri. Kapal dan alat tangkap tersebut dapat digunakan untuk menambah sektor perikanan dan kelautan apabila dimanfaatkan secara maksimal. Akan lebih baik lagi jika setiap tahun ada peningkatan jumlah armada penangkapan ikan dan alat tangkap.

Pemerintah harus berperan serta dalam pengadaan kapal dan alat tangkap. Seperti mendirikan koperasi yang menjual alat tangkap dengan harga yang terjangkau, atau bahkan bisa mengadakan kegiatan pelatihan membuat alat tangkap sendiri. Selain itu juga bisa membantu para nelayan untuk membeli perahu dan kapal motor dengan kredit bunga rendah. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh suryono (2004:14-25) paradigma pembangunan yang kedua yakni pertumbuhan penduduk dengan pemerataan. Pendekatan kedua yakni

dengan mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit dan fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. Dengan begitu masyarakat petani ikan dan nelayan bisa mandiri dan tidak terlalu menggantungkan diri pada pemerintah.

## **2. Balai Benih Ikan (BBI)**

Balai benih ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah dibawah pengelolaan dan pengawasan dinas kabupaten atau kota, yang bertugas melaksanakan teknik pembenihan ikan, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih, teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan. Keberadaan balai benih ikan ini sangat penting sebagai penyedia benih ikan dengan kualitas yang unggul.

## **3. Pengolahan dan Pemasaran**

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ikan hasil olahan maka perlu dilakukan pembinaan bidang pasca panen, mutu produk dan pengolahan hasil perikanan perlu ditingkatkan dan memberi nilai tambah melalui melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Kimbis). Dengan adanya Kimbis diharapkan dapat menaikkan tingkat produksi pengolahan perikanan dengan kualitas yang baik dan higienis baik terhadap komoditas ekspor maupun yang dikonsumsi di dalam negeri. Upaya peningkatan pembinaan terhadap bahan baku telah dikembangkan sistem rantai dingin yang benar disamping faktor sanitasi dan higienies yang harus diperhatikan secara serius oleh semua pihak pengolahan.

Bagi pengolahan hasil perikanan yang bersifat tradisional pembinaanyadilakukan melalui peningkatan kemampuan pengolah dan pengelolaan dan teknik pengolahan hasil perikanan. Hal ini dilakukan dengan memberikan latihan, demonstrasi dan juga penyuluhan serta introduksi atau diversifikasi pengolahan. Masyarakat nelayan/ petani ikan juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan bisnis kelompok agar bisa lebih komersial. Dengan pembinaan tersebut, keterampilan nelayan dan pengolah mempunyai alternatif dalam memasarkan hasil produksi. Dengan produk akhir yang semakin baik dengan harapan tingkat konsumsi ikan akanmeningkat.

Menurut Koetler dari Hartono (2010:8), pemasaran adalah proses sosial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan apa yang diinginkannya melauai penciptaan, penawaran, dan tukar-menukar barang da jasa secara bebas. Pemasaran ikan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dari pengoptimalan sumber daya perikanan, dalam rangka upaya perbaikan peningkatan penghasilan nelayan/ petani ikan serta pengolahan ikan. Kenaikan produksi khususnya untuk budidaya ikan di kolam perlu diimbangi dengan kelancaran pemasarannya. Selain itu produksi ikan di laut terus diupayakan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan penanganan ikan segar maupun ikan olahan serta pembenahan mekanisme pemasarannya, agar ikan dapat dinikmati dengan kondisi yang masih segar sampai ketangan konsumen. Pada umumnya para pedagang atau bakul merangkap sebagai pengolah, yang pada awalnya membeli ikan di TPI

kemudian di olah menjadi berbagai macam jenis olahan mulai dari yang tradisional hingga modern seperti Pengeringan, pemindangan, pendinginan, trasi, petis, pengasapan, tepung ikan, krupuk, cold storage/ surimi, bakso ikan, nugget, serta abon ikan dengan harapan konsumsi ikan di masyarakat meningkat.

### **c. Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan**

#### **1. Sumber Daya Perikanan**

Sumber daya ikan merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*). Istilah milik bersama tidak berarti dimiliki dalam pengertian hak individu yang bermakna sumber daya yang dapat dikaplingkapling atau dibagi-bagi, dimana masing-masing nelayan memiliki hak untuk memindah tangankan, memperjual-belikan, mewariskan atau menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Istilah milik bersama juga tidak berarti dimiliki secara bersama dengan pengertian tidak ada pemiliknnya. Ikan merupakan sumber bahan pangan dan produk lain bagi manusia dan hewan (dalam bentuk tepung ikan).

Ikan adalah mahluk hidup yang secara alami memiliki fungsi produksi alami. Dalam produksi ikan secara alami, manusia dapat mempengaruhi, tapi tidak sepenuhnya dapat mengendalikan reproduksi dan populasi ikan. Lingkungan alam sangat berpengaruh besar terhadap kondisi stok sumber daya ikan. Dalam undang-undang No. 31 Tahun 2004 juga telah dijelaskan bahwa

yang dimaksud perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional, namun demikian pemanfaatannya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ekosistemnya. Berdasarkan potensi kelautan perikanan diatas diharapkan pemerintah mampu mengelola dalam memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sektor perikanan dan kelautan diharapkan mampu menjadi sektor penggerak pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjadikan sektor ini sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah, maka diperlukan peran pemerintah dalam menjalankan pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Peran pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk membina para nelayan dengan memberikan program-program pembinaan seperti penyuluhan serta memberikan sarana dan prasarana pendukung, memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya.

#### **a) Perikanan Tangkap**

Berdasarkan hasil produksi perikanan tangkap diatas terjadi peningkatan volume produksi dari tahun per tahun, dengan hasil produksi tahun 2010 sebesar 61.431,5 ton, terjadi peningkatan 68.302,08 ton, dan pada tahun 2012 mencapai

69.216,00 ton. Dengan kenaikan produksi tersebut menunjukkan bahwa potensi perikanan dan kelautan kabupaten lamongan khususnya perikanan tangkap melimpah. Masyarakat nelayan harus mampu mengelola potensi tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Dengan harapan potensi perikanan yang melimpah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lamongan khususnya masyarakat nelayan dan petani ikan untuk mendukung pembangunan perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Banoewidjojo (1987) pembangunan perikanan adalah semua usaha dibidang perikanan yang senantiasa menciptakan perubahan-perubahan struktur sosial, khususnya yang menyangkut masarakat nelayan dan petani ikan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berasal dari bidang perikanan.

Prospek pengembangan perikanan tangkap sangat besar di wilayah pesisir lamongan. Hal ini terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum nasional di kawasan brondong-paciran. Untuk perikanan tangkap atau laut akan dikembangkan sebagai berikut:

- Pengembangan pelabuhan perikanan nusantara di kecamatan brondong,
- Pengembangan tempat pelelangan ikan di kecamatan brondong dan paciran,
- Pengolahan hasil perikanan di brondong dan paciran.

#### **b) Budidaya**

Kegiatan budidaya sawah tambak dan kolam yang tersebar di beberapa kecamatan, sesuai karakteristik wilayahnya, budidaya ikan sawah-tambak dengan menggunakan pola ikan-ikan-padi, dan ikan-padi-padi. Adapun

pengembangan perikanan budidaya dengan potensi perikanan budidaya yang disesuaikan dengan komoditas unggulan kecamatan. Pengembangan perikanan budidaya Dalam sektor perikanan dan kelautan menurut Soeseno (1985:1) budidaya digunakan bagi kegiatan usaha produksi suatu komoditi. Budidaya ikan meliputi baik usaha dikolam air tawar, maupun air payau. Kegiatan berupa “membudayakan” ikan, yang dulunya hidup liar, menjadi ikan kultur (piaraan). Produksi yang dimaksud merupakan produksi hasil perikanan dan kelautan. Budidaya yang dilakukan dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan meliputi budidaya air, keramba jaring, pemberdayaan usaha garam, dan penangkapan ikan di laut kegiatan produksi perikanan dan kelautan. Kegiatan budidaya ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Friedmann (1992) dalam Suryono (2006:15-25), konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Dalam kegiatan budidaya ini diharapkan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaannya secara langsung untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan khususnya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan kabupaten lamongan. Masyarakat juga akan mendapatkan pembelajaran sosial melalui pembinaan dan penyuluhan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan modal atau pinjaman modal dengan bunga rendah atau bantuan lain seperti sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ini.

Pemerintah dalam arti dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan telah menyediakan sarana dan prasarana seperti BBI (Balai Benih Ikan) yang memiliki peranan penting dalam usaha perikanan Lamongan sebagai penyedia benih ikan bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan, dan pemuliaan induk-induk unggul. Tujuan lain dari budidaya untuk mengembangkan, mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan juga meningkatkan pendapatan petani (nelayan).

Kegiatan ini sesuai dengan konsep pembangunan dari suryono (2004:83-84), konsep pembangunan mempunyai kaitan kuat dengan sistem nilai, gerakan, mode, strategi, dan indikator yang menjadi dominan setiap negara berkembang. Pembangunan sebagai sistem mencakup komponen masukan dan komponen keluaran. Komponen masukan, terdiri dari nilai, sumber daya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat, komponen proses terdiri dari organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Komponen keluaran Pembangunan sebagai gerakan mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah dan berkelanjutan. Jadi masyarakat memiliki peran sebagai subyek dalam pembangunan yang bekerjasama dengan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### **c) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam (PUGAR)**

Kegiatan pugar merupakan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) dilaksanakan melalui prinsip bottom-up, artinya masyarakat sendiri yang merencanakan

kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, dengan kegiatan mengolah tambak garam sebagai peluang kerja serta mensejahterakan masyarakat pesisir petambak garam. Hal ini sesuai dengan Konsep pemberdayaan yang dikemukakan Friedmann (1992) dalam Suryono, mengemukakan konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

## **2. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan**

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada kabupaten lamongan khususnya dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan untuk lebih mengembangkan potensi yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi dan keunggulan yang berupa sumber daya perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi potensi sumber daya yang ada. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam membangun serta meningkatkan daya guna potensi daerah dan keanekaragaman sumber daya daerah yang termasuk didalamnya pembangunan dibidang perikanan dan kelautan dengan berbasis pada peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

maka pengelolaan perikanan harus dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

**Program dan Kegiatan:**

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dengan kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir pemberdayaan (wanita pesisir) dan perbaikan/ peningkatan jalan pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian.
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dengan kegiatan pembentukan masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan seperti:
  1. Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan,
  2. Pengawasan/operasi penggunaan bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminasi bagi produk perikanan,
  3. Pembangunan kantor pokmaswas, pengelolaan dan peningkatan kawasan konservasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun,
  4. Perencanaan zonasi, perencanaan pengelolaan dan aksi.

Dengan program tersebut terbentuklah kelompok pengamanan dan pengawas masyarakat terhadap penggunaan alat-alat yang tidak berizin dan

tidak ramah lingkungan, penggunaan bahan-bahan kimia. Konservasi hutan bakau dan padang lamun untuk mengurangi dampak negative bencana yang akan terjadi.

- c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut dengan kegiatan penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumber daya laut.
  - d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan iklim laut, dengan kegiatan kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut seperti pembangunan tangkis penahan abrasi di daerah pesisir, dengan mengembangkan sistem kewaspadaan dini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengurangi dampak negative bencana dengan upaya konservasi hutan mangrove serta padang lamun.
5. Program pengembangan budidaya perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan bibit ikan unggul,
  2. Pendampingan pada kelompok tani dan pembudidaya ikan seperti memfasilitasi PMI sawah tambak dan monitoring kualitas air dan penyakit ikan,
  3. Pembinaan dan pengembangan perikanan yang meliputi:
    - Pelatihan dan pembinaan bagi pembudidaya ikan,
    - Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya
    - Pengadaan peralatan dan bahan-bahan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta rehabilitasi/ perawatan BBI

Perbaikan dan perawatan balai benih ikan, menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya, memberikan pembinaan dan penyuluhan CBIB (cara budidaya ikan yang baik), menyediakan bibit ikan yang unggul, menyediakan layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta kualitas air.

f. Program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap seperti pembinaan KUB perikanan tangkap,
2. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),
3. Pemeliharaan rutin dan berkala TPI,
4. Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan,
5. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap,
6. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan tangkap,
7. Pengadaan sarana dan prasaranan penangkapan ikan.

Memberikan pembinaan kepada kelompok usaha bersama (KUB) dalam membangun kegiatan usaha yang saling menunjang menuju tercapainya efisiensi usaha serta meningkatnya pendapatan keluarga nelayan yang bergerak dalam bidang penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan produk perikanan, pemasaran hasil perikanan maupun usaha pendukung kegiatan perikanan tangkap. Perbaikan terhadap sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti pelabuhan pendaratan ikan beserta tempat pelelangan ikan.

- g. Program pengembangan sistem penyuluhan dengan kegiatan seperti pembinaan dan penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan, dan pengadaan sarana dan prasarana peralatan penyuluhan.
- h. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pengadaan sarana dan prasarana distribusi ikan,
  2. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan,
  3. Peningkatan mutu dan higienitas hasil perikanan,
  4. Sosialisasi dan promosi gerakan gemar ikan.

Membuka jalur distribusi hasil produksi perikanan, memberikan fasilitas pengolahan hasil perikanan, memberikan pembinaan dan penyuluhan pengolahan perikanan dengan meningkatkan kualitas hasil olahan yang higienis dengan tujuan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan**

### **a. Faktor Pendukung**

Beberapa faktor pendukung pengembangan kelautan dan perikanan kabupaten Lamongan antara lain adalah potensi ikan laut yang mencapai 60.000 ton/ tahun dan belum dimanfaatkan secara optimal, pemanfaatan perairan umum khususnya waduk untuk menaikkan jumlah produksi dengan aneka kegiatannya, masih tersedianya lahan potensial yang bisa digunakan untuk memperluas areal budidaya ikan konsumsi. Hal ini sesuai dengan undang-undang no.31 tahun

2004 bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan dan mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal. Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan laut yang belum termanfaatkan secara optimal, dan memanfaatkan perairan umum, serta tersedianya lahan potensial yang bisa digunakan untuk memperluas areal budidaya perikanan. Pemanfaatan secara optimal perlu dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan.

Selain itu dalam undang-undang no.31 tahun 2004 juga disebutkan tujuan pengelolaan perikanan yaitu meningkatkan produktivitas mutu, nilai tambah, dan daya saing. Selain itu penambahan jumlah armada, ukuran kapal serta jenis alat tangkap yang dioperasikan, yang merupakan salah satu program dari dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan. Sesuai dengan paradigma pembangunan menurut Arndt (1989) dalam suryono (2006:15-25) tentang teknologi tepat guna. Melalui teknologi tepat guna ini maka sumber-sumber daya lokal yang tersedia dapat termanfaatkan sebagai sumber panghasilan penduduk.

#### **b. Faktor penghambat**

Selain faktor pendukung diatas, ada beberapa kendala atau penghambat dalam usaha mengoptimalkan dan pengelolaan sumber daya perikanan di kabupaten lamongan yang disebabkan oleh:

1. Adanya degradasi lingkungan laut;

2. Adanya penggunaan alat serta bahan penangkap ikan yang berbahaya (tidak ramah lingkungan);
3. Terjadinya perubahan iklim cuaca yang mengakibatkan area penangkapan nelayan (fishing ground) semakin jauh;
4. Armada perikanan yang ada masih banyak armada yang berukuran dibawah 30 GT;
5. Belum semua petani menggunakan bibit dengan standar SNI yang diharapkan;
6. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan tambak/sawah akibat penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar yang direkomendasikan pada CBIB;
7. Belum terdeteksinya permasalahan hama dan penyakit ikan secara menyeluruh yang terjadi di lingkungan tambak/sawah tambak;
8. Banyaknya hama penyakit ikan;
9. Terbatasnya sarana prasarana permodalan bagi pembudidaya ikan;
10. Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya;
11. Hambatan selanjutnya terdapat pada point peningkatan investasi, dalam peningkatan investasi khususnya di bidang kelautan dan perikanan masih terdapat kendala dimana tingkat investasi dalam bidang ini masih tergolong rendah, hal ini dipengaruhi oleh:
  - a. Rantai permasalahan hasil produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan belum tertata dengan baik.
  - b. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang masih kurang.

- c. Pengelolaan informasi data masih belum dilakukan secara professional.

Untuk mengatasi hambatan tersebut upaya yang dilakukan dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peracun, alat peledak, dan stroom serta penggunaan bibit unggul sesuai standart yang telah ditetapkan dan penebaran benih kembali (Re-Stocking) pada laut lepas dan perairan umum, membuat rumpon dalam yang merupakan tempat untuk berkumpul ikan karena ikan tidak menetap melainkan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain serta agar ikan dapat bereproduksi dengan baik tanpa adanya gangguan. Meningkatkan kualitas produksi perikanan, sumber daya manusia (nelayan) dan menambah jumlah personil dalam bidang penyuluhan dan pembinaan. Menambah sarana dan prasarana dan meminjamkan modal dengan bunga rendah kepada nelayan. Pengembangan jalur distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Peningkatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Menurut *World Commision* (1987) dari Suryono, pembangunan berkelanjutan adalah “suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Penyuluhan yang berkaitan dengan larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peracun, alat peledak, dan stroom/listrik merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan, dimana dalam proses penangkapan ikan masyarakat/ nelayan tidak merusak ekosistem tersebut. Serta

menambah peraturan perundang-undang yang mendukung dalam menegakkan hukum bagi oknum-oknum perusak ekosistem laut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan daerah studi pada dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan daerah yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan, yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia yang meliputi sumber daya aparatur dan sumber daya nelayan/ petani ikan dengan program dan kegiatan pemberian penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan dan petani ikan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur dinas perikanan dan kelautan dalam rangka meningkatkan kualitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua adalah pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan dengan program dan kegiatan pengadaan dan pembenahan infrastruktur, serta teknologi yang digunakan. Yang ketiga adalah program pengembangan pengelolaan pada pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan pada pengembangan program sarana dan prasarana dilakukan pembangunan, pembenahan serta

pengoptimalan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan dan kelautan.

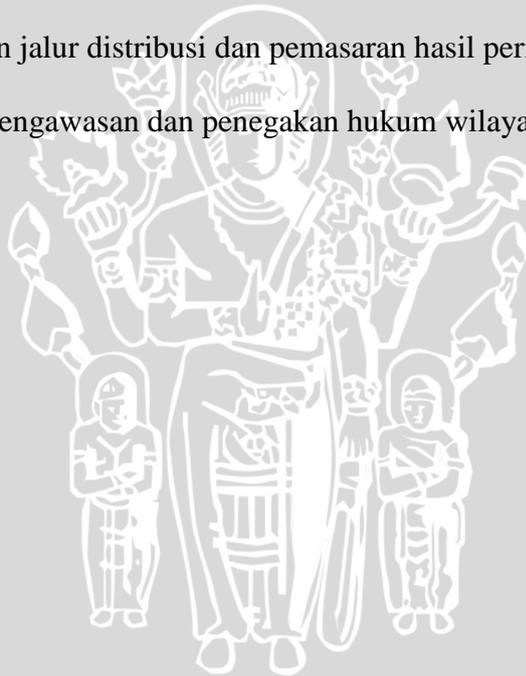
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Faktor pendukung seperti adanya kerjasama antar instansi, adanya perundang-undangan yang mendukung, adanya potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Sedangkan faktor penghambat yang meliputi terbatasnya sarana dan prasarana, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan degradasi lingkungan.

#### **B. Saran**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya perikanan.
2. Mendorong usaha peningkatan hasil perikanan tangkap dan budidaya melalui pengembangan teknologi yang canggih seperti pengadaan armada dan alat tangkap yang ramah lingkungan.
3. Meningkatkan produksi usaha nelayan dan membina industri pengolahan hasil perikanan.
4. Untuk meningkatkan produksi perikanan dan kelautan Memberikan pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peracun, alat peledak, dan stroom serta penggunaan bibit unggul sesuai standart yang telah ditetapkan dan penebaran benih kembali (Re-Stocking) pada laut lepas dan perairan umum, membuat rumpon dalam yang merupakan tempat untuk berkumpul ikan karena ikan tidak menetap

melainkan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain serta agar ikan dapat bereproduksi dengan baik tanpa adanya gangguan.

5. Mengembangkan kelembagaan perikanan seperti POKDAKAN, POKLAHSAR, dan POKMASWAS.
6. Meningkatkan infrastruktur perikanan melalui pengadaan atau pembenahan tempat pelelangan ikan, pelabuhan pendaratan ikan, laboratorium perikanan, dan jalanan pesisir, serta meminjamkan modal dengan kredit bunga rendah.
7. Mengembangkan jalur distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
8. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum wilayah pesisir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Bakar, MA. 2002. *Peran Organisasi Perikanan Dalam Pembangunan Perikanan Nasional*. ISPIKANI.
- Banoewidjojo, M, 1987. *Pembangunan Pertanian*. Dalam Inventarisasi Potensi Perikanan dan Kontribusinya Terhadap PDRB Kabupaten Malang: Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. (tidak diterbitkan).
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Cholik, Fuad. 2006. *60 Tahun Perikanan Indonesia*. Jakarta: PT Indonesia Kreasi Mandiri.
- Dahuri, R. 2002. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautandan Perikanan*. ISPIKANI.
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategis, Konsep, Edisi Ketujuh. Reason Education Asia*. Jakarta: PT Prehalindo.
- Dirgantoro, Crown. 2001. *Manajemen Strategik, konsep, kasus, dan implementasi*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, Bambang. 2010. *Manajemen Pemasaran untuk Rumah Sakit*. Jakarta: Rineka Cipta
- Herunawati, E.S. 2002. *Pengembangan Produk Pasca Panen Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Akselerasi Pembangunan Perikanan*. ISPIKANI
- Katili, J.A. 1983. *Sumberdaya Alam Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumastanto, T. 1999. *Pembangunan Sektor Kelautan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*. Bogor: PKSPL-IPB.
- Miles, Mathew B dan Huberman, A. Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UMM Press.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

\_\_\_\_\_. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Rahardi, F, Regina Kristiawati dan Nazaruddin. 2003. *Agribisnis Perikanan*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Reksohadiprojo.1985.*Pengantar Ekonomi Sumberdaya Alam*. Yogyakarta: BPFE.

Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi Pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan, Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: CV Rajawali.

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Non Profit*. Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Malang.

Siagian, Sondang P. 1999. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara

Soemokaryo, Soepanto. 2001. *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*. Malang: Agritek.

Soeseno, Slamet 1985. *Budidaya Ikan dan Udang dalam Tambak*. Jakarta: PT Gramedia.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia.

Tribawono, MSi.2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Victor, N. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: PT Pustaka Cisendo.

Warsito, Yuwono. Teguh. 2003. *Otonomi daerah Capacity building dan penguatan demokrasi local*. Semarang: Puskodak Undi

**Jurnal**

Kristiyanti, Mariana. 2009. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Kelautan. Jurnal Sain dan Teknologi MARITIM (ISSN : 1412-6828)*. VIII (I) Diposkan oleh LPPM Universitas AKI Semarang.

**Internet**

Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur. 2010. *Strategi dan Arah Kebijakan*. Diakses tanggal 27 Februari 2011 dari <http://idolawebhost.com/dinas/images/stories/strategi.pdf>.

M. Masykur, Dedi Riyadi, Dr. Ir. 2004. *Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan*. Diakses tanggal 4 Februari 2013.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. Nomor Kep.18/Men/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan. Diakses Tanggal 5 Maret 2013.

Undang-Undang No. 31.2004 "UU Perikanan No. 31 Tahun 2004", diakses tanggal 27 Februari 2013 dari [http://infohukum.kkp.go.id/files\\_uu/UU-2004-31.pdf](http://infohukum.kkp.go.id/files_uu/UU-2004-31.pdf).

Undang-Undang No. 32. 2004 "UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004", diakses tanggal 24 Februari 2013 dari <http://www.dikti.go.id/files/atur/UU32-2004PemdaPenjelasan.pdf>

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).2011. Laut Indonesia atau Laut Asing. Diakses tanggal 24 Februari 2013 dari <http://gredinov.phpnet.us/?m=200804>.

Banjarmasinpost.2012. Lamongan Penghasil Ikan Terbesar di Jawa Timur. Diakses Tanggal 5 Februari 2013 dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/mobile/2012/12/18/lamongan-penghasil-ikan-terbesar-di-jawa-timur>

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan. <http://www.lamongankab.go.id/>

Website resmi dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan. <http://www.lamongankab.go.id/index/php/skpd/dinas/perikanan-a-kelautan>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia  
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227  
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan  
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata  
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 3617/UN.10.3/PG/2013  
Lampiran : 1 Eksemplar  
Perihal : Riset  
Kepada : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman empirik mahasiswa, Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset guna melengkapi informasi akademis bagi mahasiswa sebagaimana tertera di bawah ini:

Nama : Muhimmatus Sa'adah  
Alamat : Jl. Tlogo Agung No. 89 Malang  
Nim : 0910313116  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi : -  
Judul Penelitian : Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan Daerah (Studi Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan)  
Lamanya Penelitian : 1 (satu) bulan  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 01 Maret 2013

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si

NIP. 19710510 199803 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217  
Telp. (0322) 321706 Email : [www.bakesbang@lamongankab.go.id](mailto:www.bakesbang@lamongankab.go.id).  
website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 4 April 2013

Nomor : 072/ 190 /413.204/2013  
Sifat : Penting  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan  
Kelautan Kabupaten Lamongan  
Di-  
LAMONGAN

Menunjuk surat dari Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi, tanggal 01 Maret 2013, Nomor : 3617/UN.10.3/PG/2013 perihal pada pokok surat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan ijin penelitian oleh :

1. Nama : MUHIMMATUS SA'ADAH
2. NIM : 0910313113
3. Alamat : Pucuk RT/RW 003/002 Kec. Pucuk Kab. Lamongan
4. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
5. Tema / Judul : Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Daerah (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan)
6. Lokasi : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan
7. Waktu / Tanggal : 4 April s/d 4 Juni 2013
8. Peserta : -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten lamongan.
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyingung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Setelah berakhirnya kegiatan penelitian diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian sebelum meninggalkan daerah setempat.
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  
Demikian untuk menjadi maklum atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMONGAN

sekretaris  
  
BUSHOIRI, SH, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620624 189803 1 005



**CURRICULUM VITAE**

**Nama Lengkap** : Muhimmatus Sa'adah  
**Tempat, tanggal lahir** : Lamongan, 22 Juli 1991  
**Alamat Asal** : Ds/Kec. Pucuk 12/03 Lamongan  
**Alamat Malang** : Jl. TlogoAgung No. 89 Malang  
**Ponsel** : 08563531666  
**Alamat Email** : apa.yaaah@gmail.com  
**JenisKelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Status Perkawinan** : Islam  
**Pekerjaan Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Pendidikan** :

1. MI Ma'arif Pucuk Lamongan - Lulus Tahun 2003
2. SMPN 3 Peterongan Jombang - Lulus Tahun 2006
3. SMAN 1 Lamongan - Lulus Tahun 2009
4. Universitas Brawijaya Malang - Lulus tahun 2013

